

**KORIDOR : SUMATERA
FOKUS KEGIATAN: KELAPA SAWIT**

L A P O R A N

**PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL MASTERPLAN PERCEPATAN
DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
(PENPRINAS MP3EI 2011-2025)**

**FOKUS/KORIDOR
KELAPA SAWIT / SUMATERA**



**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
KOMODITI SAWIT DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

**Dr. SAIFUDDIN, S. PdI., MA
Dr. MUHAMMAD BIN ABUBAKAR, BH. Sc., MA
SUADI, S.A g., M. Si
FADLI, SP., MP**

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr.SAIFUDDIN
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh
NIDN : 0020077906
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Sosiologi
Nomor HP : 081360352007
Alamat surel (e-mail) : saifuddin_my@

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. MUHAMMAD BIN ABUBAKAR B.H.SC.,MA
NIDN : 0011087308
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Anggota (2)

Nama Lengkap : SUADI S.Ag.,M.Si
NIDN : 0016087605
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Anggota (3)

Nama Lengkap : FADLI SP.,M.Si
NIDN : 0031127312
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Alamat : Idi, Aceh Timur
Penanggung Jawab : Ir. Saifuddin, MP
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 150.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 294.769.000,00



Lhokseumawe, 21 - 12 - 2015
Ketua,

(Dr.SAIFUDDIN)
NIP/NIK 197907202006041003



Menyetujui,
Rektor Unimal

(Dr. Apridar, SE., M. Si)
NIP/NIK 196704132001121001

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian tahun 2014 yang mengkaji kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui komoditi sawit. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan baru penanam sawit terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan, mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit, dan merumuskan model serta kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan reintegrasi mantan GAM dan masyarakat korban konflik dalam usaha mewujudkan pembangunan perdamaian positif berkelanjutan, dan memberikan solusi kepada pemerintah Aceh Timur dalam pembukaan dan pemanfaatan lahan sawit dengan merumuskan model dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam kajian ini adalah pihak pemerintah Aceh Timur dan atau dinas terkait, mantan GAM dan masyarakat korban konflik. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program bantuan sawit yang dijalankan di Aceh Timur telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan pendapatan petani penerima bantuan maupun masyarakat sekitarnya. Penanaman sawit juga telah membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan juga berdampak terhadap peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan menurun. Pada akhirnya pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit dapat menghilangkan sikap separatisme di masyarakat Aceh. Kebijakan pengembangan kawasan agribisnis perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Aceh telah ada sebelum tsunami, tetapi keberhasilannya terhambat oleh kurangnya sumber daya dan konflik. Pasca tsunami dan konflik sumber daya manusia dan keuangan yang memadai di Aceh sehingga kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit ini dijalankan kembali secara lebih serius oleh Dinas Perkebunan Aceh, Asian Development Bank (ADB) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Perluasan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi bagian penting dalam perekonomian di Aceh. Pemerintah Aceh juga sangat concern dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mempercepat realisasi program pengembangan perkebunan sawit. Model pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Timur saat ini akan lebih baik dalam pelaksanaannya jika pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan tersebut. Hal ini penting dilaksanakan sebab dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ada bibit sawit bantuan pemerintah yang sampai hari ini belum ditanam oleh masyarakat dengan berbagai alasan

Keywords: Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Sawit.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Urgensi Penelitian	2
1.3 Luaran dan Kontribusi terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Konsep Kebijakan	3
2.2 Pemberdayaan Ekonomi	4
2.3 Kelapa Sawit	5
2.4 Strategi Pengentasan Kemiskinan	6
2.5 Dampak Penanaman Sawit	7
2.6 Penelitian Pendahuluan	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
3.1 Tujuan Penelitian	9
3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB IV METODE PENELITIAN	11
4.1 Pendekatan Penelitian	11
4.2 Teknik Pengumpulan Data	12
4.3 Analisa Data	12
4.4 Luaran Pertahun dan Indikator Capaian	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
5.1 Geografi dan administrasi lokasi penelitian	15

5.2 Sumber Daya Alam dan Potensi lain di Kabupaten Aceh Timur	16
5.3 Peta Pemanfaatan Kebun Sawit Mantan Komabatan GAM dan Masyarakat Korban Konflik	31
5.4 Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik melalui komoditi sawit	36
5.5 Dampak Sawit terhadap Kehidupan sosial dan Ligkungan	44
5.6 Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan mantan GAM dan Masyarakat Korban Konflik Melalui Program Saawit	52
5.7 Analisis Model Pengentasan Kemiskinan	57
BAB KESIMPULAN DAN SARAN	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ekonomi Indonesia, khususnya Aceh hingga kini masih bergantung pada sektor pertanian (perkebunan). Sebagian besar tenaga kerja terserap disektor ini, walaupun tidak dapat dipastikan jumlahnya secara pasti. Komoditi sawit saat ini menjadi komoditi terpopuler di Aceh, “tanaman emas” pasca kasusepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Komoditi kelapa sawit juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian mantan GAM dan masyarakat korban konflik.

Komoditi kelapa sawit memiliki berbagai macam kegunaan, baik untuk industri pangan maupun non pangan. Oleh karena itu peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui komoditi kelapa sawit masih cukup terbuka bagi Aceh. Provinsi Aceh memiliki iklim dan topografi yang sangat “ideal” bagi penggarapan kelapa sawit (Firman, dkk., 2007:5). Selain itu, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh setelah minyak dan gas.

Luasan areal perkebunan kelapa sawit di Aceh terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta, tetapi juga terdapat perkebunan rakyat yang sudah berkembang dengan pesat, baik melalui bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat sendiri. Untuk itu, kontribusi kelapa sawit untuk meningkatkan perekonomian lokal tidak perlu diragukan lagi. Namun pada sisi lain berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga telah berdampak buruk terhadap pengembangan dan pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi. Aceh menduduki peringkat daerah termiskin kelima di Indonesia dan termiskin se Sumatera. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Syech Suhaimi pada September (2012)

jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 18,58% masih berada diatas angka kemiskinan nasional yang hanya 11,66% (Bisnis Aceh, 11 Februari 2013).

Fenomena seperti ini juga berlaku di Aceh Timur. Kelapa sawit menjadi komoditi unggulan utamanya di samping komoditi yang lain seperti Kakao, Karet, Kopi dan Kelapa. Namun tingkat kemiskinan mencapai 19,46% pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik Aceh Timur, 2013). Di samping itu banjir sudah menjadi langganan tahunan, bahkan meluas ke jalan negara yang mengganggu transportasi Aceh – Medan, satu minggu sampai dua minggu lamanya. Akibatnya bahan sembako di Aceh langka dan harganya meningkat.

1. 2 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan reintegrasi mantan GAM dan masyarakat korban konflik yang dapat mewujudkan pembangunan perdamaian positif berkelanjutan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada pemerintah Aceh Timur dalam pembukaan dan pemanfaatan lahan sawit yang tidak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

1. 3 Luaran dan Kontribusi Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan model dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berparadigma pembangunan yang berkelanjutan. Sementara untuk ilmu pengetahuan adalah sebagai pengembangan ilmu sosial ekonomi dan bahan perbandingan bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yaitu rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Suharto. 2011)

Sementara Winarno (2007) mengatakan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Berdasarkan beberapa definisi di atas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian ide atau gagasan yang tersusun yang dijadikan sebagai pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan yang ditetapkan sebagai *roadmap* pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Untuk itu, kebijakan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tetapi memerlukan usaha para pengambil kebijakan untuk mengimplimentasikannya. George C Edwar III mengusulkan bahwa kebijakan dapat dijalankan melalui empat unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono. 2009)

- a. Komunikasi, setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi yang dijalankan efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran.

- b. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi, implementator kebijakan harus memiliki karakter jujur, komitmen dan demokratis.
- d. Struktur birokrasi, kerangka kerja dan struktur organisasi pelaksana mudah dipahami, tidak berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi juga harus menjamin adanya pengambilan keputusan secara cepat atas kejadian di luar kebiasaan.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto. 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho. 2001).

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan

lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah peDesaan. (3) Fasilitasi pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi msyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

2.3 Kelapa Sawit

Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak berkembang di Amerika dan Asia Tenggara (Adams, 2011). Secara usia kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman tahunan. Ia merupakan komoditas andalan untuk ekspor non migas. Indonesia merupakan negara pengeksport kelapa sawit terbesar, kemudian disusul oleh Malaysia dan Papua New Guinea (Portal Nasional Republik Indonesia, 2010).

Pemanfaatan kelapa sawit lebih populer digunakan sebagai minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah dan perasan biji. Kelapa sawit memiliki nilai konsumtif dan nilai ekonomis. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia, produksinya menempati tingkat pertama minyak nabati yang mencapai sekitar 45 juta ton (Adams, 2011), dan menempati urutan kedua dari minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai.

2.4 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Secara etimologi kemiskinan dapat berarti tidak memiliki harta, berpenghasilan rendah dan serba kekurangan dalam memenuhi keperluan hidup. Oscar Lewis dalam Antjok (1995) menyatakan kemiskinan adalah penderitaan ekonomi dalam enam bentuk, yaitu; (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) pengangguran dan pengangguran tenaga skil (3) upah buruh rendah (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status sosial (5) sistem keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Selo Sumarjan (1977) adalah disebabkan oleh tiga faktor. Pertama faktor individual, yaitu seorang miskin karena tidak memiliki modal financial, modal ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak mendapat kasusempatan pendidikan. Kedua, faktor struktural yaitu miskin yang tercipta dari sistem pengelolaan sumber daya yang tidak tepat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses kepada sumber daya secara baik.

Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dorongan sosial untuk menggali sumber daya yang melimpah. Adat dan budaya menjadi penghambat untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.

Ada tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan menurut Starhm (1999) yaitu; pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas (2) tatanan perekonomian baru dan (3) pembangunan mandiri dengan melihat kekurangan rantai-rantai kemiskinan. Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat strategi pengentasan kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga produk pertanian yang memadai serta peluang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang

infrastruktur fisik dan sosial, (3) penyediaan teknologi bagi si miskin, (4) peran kelembagaan yang efektif, seperti NGO dan konsultan yang memberi pelayanan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas hidup.

Sementara Dalle Daniel Sulekale (2008) menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Para pembuat kebijakan tidak melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partisipasi penduduk miskin. Disamping itu dibutuhkan pendampingan yang membantu mendorong tumbuhnya partisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan di lingkungannya, dan penguatan kemampuan kelembagaan penduduk miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin bentukan mereka.

2.5 Dampak Penanaman Sawit Terhadap Sosial dan Lingkungan

Erwin, dkk (2009) menyebutkan kelapa sawit memiliki dampak sosial yang negatif antaranya terhadap keamanan pangan, perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan sementara dampak lingkungan perubahan tentang alam dan tata guna lahan pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran kimia. Selanjutnya pembukaan lahan sawit telah berdampak terhadap konflik sosial, di Indonesia terdapat 500 kasus konflik sosial di sektor perkebunan kelapa sawit akibat persoalan hak atas tanah, sengketa tenaga kerja, ketidak harmonisan kemitraan, kriminalisasi penduduk Desa dan skandal politik tingkat tinggi (Green Peace, 2010).

Namun demikian selain dampak negatif penanam kelapa sawit juga memberikan dampak positif. Diantaranya terserap tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha informal seperti warung dan perdagangan jasa (Effendi, 1996).

2.6 Penelitian Pendahuluan

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah Sawit Tanaman Emas; Pasca Tsunami di Aceh dilakukan oleh Firman, dkk, (2007), menyatakan bahwa Industri kelapa sawit seringkali memberi dampak negatif ketimbang keuntungan. Lahan yang diidentifikasi untuk produksi kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat baik yang dimiliki secara pribadi atau secara komunitas. Kebutuhan masyarakat setempat jarang sekali mendapatkan perhatian ketika izin dikeluarkan. Lebih parah lagi kebanyakan masyarakat Aceh tidak memiliki sertifikat tanah sehingga sering tidak menerima kompensasi atas tanah yang diambil untuk perkebunan. Pengelolaan lahan yang luas oleh suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat merubah dinamika perekonomian lokal, mengubah pemilik lahan menjadi tenaga upahan atau pekerja. Pohon kelapa sawit tidak menyimpan air sebagaimana hutan asli. Ketika tanah telah dibersihkan dari hutan dan tumbuhan aslinya, banjir dan tanah longsor telah menjadi hal yang umum.

Mawardati (2010) menyimpulkan bahwa produktivitas kelapa sawit di berbagai lokasi di Naggroe Aceh Darussalam terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan cara pemeliharaan/perawatan. Faktor luas lahan, tenaga kerja, pupuk KCL, pupuk kiseriete serta penerapan teknologi seperti pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan berpengaruh positif terhadap produksi. kombinasi faktor produksi dan penerapan teknologi belum mencapai produksi yang maksimal. Jika produksi kelapa sawit mampu ditingkatkan secara maksimal maka peluang petani untuk meningkatkan pendapatannya semakin besar. Almasdi Syahza (2005) Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peta pemanfaatan areal kebun sawit oleh mantan GAM dan masyarakat korban konflik yang difasilitasi oleh pemerintah Aceh Timur.
2. Menganalisis tingkat kasusejahteraan ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit.
3. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan baru penanam sawit terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan
4. Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur dalam upaya meningkatkan kasusejahteraan mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit.
5. Merumuskan model serta kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

Namun demikian penelitian pada tahun pertama dilakukan untuk mencapai dua tujuan saja yaitu tujuan pertama dan kedua. Oleh sebab itu manfaat yang disampaikan dalam penelitian ini juga difokuskan pada dua tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, di antaranya:

1. Tersusun peta pemanfaatan areal kebun sawit yang digunakan oleh mantan GAM dan masyarakat korban konflik yang difasilitasi oleh pemerintah Aceh Timur.
2. Terdokumentasi informasi tingkat kasusejahteraan ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pengembangan ilmu sosial dan ekonomi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Suyatno (2005) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang dikaji. Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller (1986) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan pelbagai metode yang ada. Dengan demikian penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan menyeluruh. Dalam hal ini penelitian kualitatif berupaya menyajikan dunia sosial dari segi konsep, perilaku, perspektif dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah mantan GAM dan masyarakat korban konflik serta pihak pemerintah atau dinas terkait di Kabupaten Aceh Timur. Dengan maksud mendapatkan gambaran secara nyata dan terevaluasi mengenai strategi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan evaluatif sifatnya.

4. 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui; (1) wawancara mendalam, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang ditentukan secara *purposive* (Bupati dan Kepala dinas terkait, mantan GAM dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur) guna mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif; (2) observasi non partisipan, dan (3) studi dokumentasi seperti bulletin, laporan tahunan, jurnal, majalah, koran, foto, dan catatan/laporan/arsip.

4.3 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif Miles dan Haberman. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yang lakukan sejak pengumpulan data dimulai yaitu: Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik dan table. Penarikan kasusimpulan adalah mencari makna, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Dilakukan secara cermat dan sistematis dengan cara verifikasi, memeriksa kembali catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiyono, 2013).

4. 4 Luaran Pertahun dan Indikator Capaian

Tahun pertama

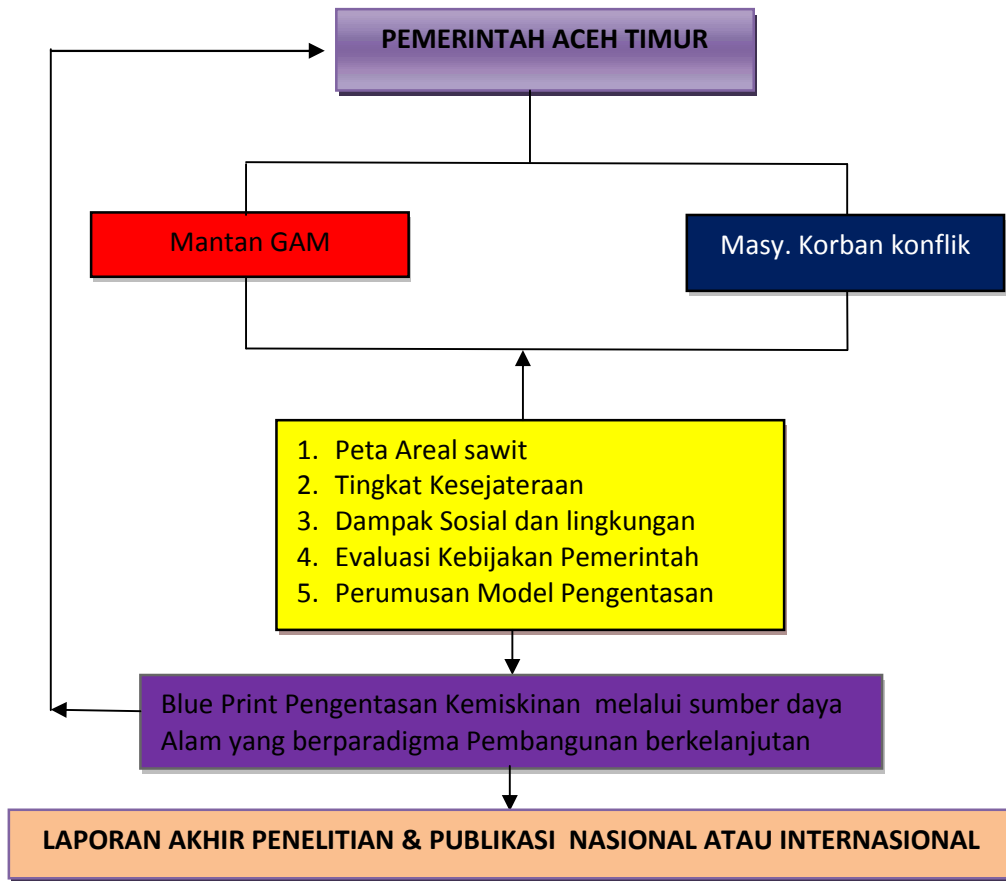
Luaran: Terbentuk peta pemanfaatan areal kebun sawit dan adanya dokumen kasusejahteraan ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit.

Indikator: Teridentifikasi jumlah areal sawit dan tingkat kasusejahteraan ekonomi mantan GAM dan masyarakat korban konflik.

Tahun kedua

Luaran: Adanya dokumen dan laporan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan baru penanam sawit terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan serta adanya model dan *blue print* pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

Indikator: Teridentifikasi secara pasti dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembukaan lahan tanaman sawit serta terukur peningkatan kasusejahteraan melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Akhirnya terformulasi model serta kebijakan pengentasan kemiskinan melalui tanaman sawit yang tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan. Untuk jelas mengenai indikator capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 4.1: Diagram Luaran Pertahun Dan Indikator Capaian

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Geografis dan Administrasi Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki letak yang sangat strategis sebagai penghubung antara ibukota Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Medan). Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040.60 Km² atau 10.53% dari luas Provinsi Aceh dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Utara dan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah (BPS Aceh Timur, 2010).

Untuk lebih jelas mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada peta Aceh di bawah ini:



Gambar 5.1: Peta Aceh

Secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Idi Rayeuek yaitu 413 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Serbajadi yaitu 3 jiwa/km². Adapun luas rata – rata wilayah per kecamatan adalah 287,7 Ha dengan luas wilayah terbesar pada Kecamatan Serbajadi (BPS Aceh Timur, 2010)

Sebahagian besar wilayah Aceh Timur didominasi oleh hutan dengan luas mencapai 346.469 Ha (57,36%), selebihnya adalah kawasan perkebunan besar dan kecil seluas 78.513 Ha (13%), kebun seluas 39.972 Ha (6,61%), ladang seluas 39.330 (6,51%), sawah seluas 35.887 Ha (5,94%), bangunan/pekarangan seluas 20.881 Ha (3,46%) tambak seluas 15.150 Ha (2,51%), lahan tidak diusahakan seluas 14.655 Ha (2,43%) (BPS Aceh Timur, 2010).

5. 2 Sumber Daya Alam dan Potensi Lainnya di Kabupaten Aceh Timur

Hasil bumi dan sumber daya alam Aceh terdiri dari pertambangan, hasil hutan, perkebunan, perikanan dan kelautan, dan lain sebagainya. Zainuddin (1961) menyebutkan hasil bumi Aceh sangat melimpah ruah, tidak saja pada satu atau dua hasil, tetapi berbagai hasil bumi dan sumber daya alam lain yang sangat potensial, seperti pertambangan emas, perak, belerang, dan minyak bumi. Sumber daya alam tersebut terdapat di wilayah Peureulak, Pasai, dan Aceh Besar. Peureulak merupakan negeri pertama sekali ditemukan emas oleh orang Parsi. Selain emas, terdapat juga pertambangan minyak bumi yang ditemukan di Peureulak pada abad ke-14. Bahkan minyak tersebut telah digunakan untuk membakar kapal atau perahu perang musuh di masa perluasan Kerajaan Majapahit di Aceh. Minyak tersebut juga pernah di ekspor ke luar negara seperti Parsi dan Arab.

Selain hal tersebut di atas, Zainuddin (1961) menambahkan dalam masa penyerangan Belanda ke Aceh, mereka pernah mendarat di Peureulak Aceh Timur karena Kapten Colijn mengetahui bahwa di kawasan ini terdapat sumur minyak bumi, bahkan berita tersebut telah disampaikan kepada salah

satu perusahaan minyak bumi yang bernama *Holland Peureulak Petroleum Maatschappy* pada tahun 1897 untuk mengeksplorasinya dan seterusnya pada tahun 1908 *Bataafsche Petroleum Maatschapy* (BPM) telah membuka perusahaannya di Rantau Panjang Peureulak dan menyalurkan minyak bumi tersebut ke Pangkalan Berandan untuk dimasak dan diekspor ke luar negara. Tambang minyak Peureulak merupakan penghasil minyak terbanyak dan pertama di Nusantara selain dari Langkat.

Pada tanggal 29 Oktober 2010 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah mengeluarkan izin beroperasinya PT Medco A&P Malaka di Aceh Timur. Perusahaan ini akan mengeksplorasi minyak dan gas alam yang ada di Aceh Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh Timur merupakan salah satu wilayah di Aceh yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Serambi Indonesia yang merupakan salah satu akhbar lokal di Aceh memberitakan, nilai investasi kawasan Blok A di Aceh Timur mencecah USD 600,000,000,-. Sementara keperluan dana untuk pembukaan satu sumur mencapai USD 10,000,000,- atau setara dengan Rp 180 bilion. Bahkan sebelum adanya hasil produksi, perusahaan telah mengeluarkan dana Rp 70 bilion untuk pembangunan hospital di Aceh Timur.

Pihak perusahaan berani berinvestasi dalam jumlah yang besar di Aceh Timur karena yakin dengan keuntungan yang akan diperolehi dari mega proyek ini. Walaupun Aceh Timur memiliki sumber daya dan potensi alam yang banyak 63% kepala keluarga di Aceh Timur masih hidup dalam kemiskinan. Bahkan sesuai dengan keputusan menteri sosial Republik Indonesia nomor: 06B/HUK / 2010 tentang penyelenggaraan kasusejahteraan sosial maka Kabupaten Aceh Timur termasuk salah satu dari 50 Kabupaten daerah tertinggal di Indonesia sehingga masuk dalam program perioriti Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya percepatan peningkatan kasusejahteraan sosial dan keadilan bagi daerah tertinggal.

Jika dilihat dari segi geografis, keadaan alam di Kabupaten Aceh Timur juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Agroindustri. Ketersediaan lahan dan kondisi tanah yang sangat mendukung bagi pemanfaatan bahagian pertanian, khususnya tanaman industri telah membuat sebahagian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur bekerja di bahagian ini.

Komoditi unggulan adalah tanaman Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kelapa. Namun situasi konflik bersenjata di Aceh telah menjadi salah satu faktor yang membuat 50% perkebunan milik rakyat (dari pelbagai komoditi) rusak karena terbengkalai. Faktor lain adalah karena minimnya infrastruktur dasar pembangunan khususnya di bidang transportasi jalan dan air bersih.

Ketiadaan industri pengolahan hasil pertanian telah menyebabkan proses penyaluran hasil perkebunan rakyat menjadi lebih panjang. Akibatnya harga jual komoditi yang diterima oleh masyarakat menjadi sangat rendah. Hingga tahun 2006 tercatat sebanyak 16 perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan di Kabupaten Aceh Timur, dengan total luas Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 50.847 Ha.

Namun akibat konflik yang berkepanjangan, tidak semua areal yang telah diberikan HGU dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar tersebut. Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar lahan perkebunan dipergunakan untuk menanam komoditi sawit, yang jika dilihat dari aspek kasuseimbangan ekologi dapat mempengaruhi daya serap air tanah.

Belum ada satupun perusahaan besar yang bergerak diperkebunan melakukan pengembangan kearah Agroindustri. Meskipun jika dilihat dari besarnya kapasitas produksi pada komoditi sawit sudah dimungkinkan untuk mendirikan industri pengolahan kelapa sawit khusus hasil turunannya. Konflik masa lalu dan minimnya infrastruktur dasar pembangunan telah menjadi faktor yang mempengaruhi tumbuhnya industri dibidang perkebunan.

5. 2. 1 Pertanian

Mayoritas penduduk Aceh Timur bekerja disektor pertanian yaitu mencapai 55.856 kepala keluarga (76% dari total kepala keluarga di Aceh Timur), 34.513 jiwa berstatus sebagai petani. walaupun demikian 63 % kepala keluarga di Aceh Timur masih tergolong miskin. Mayoritas petani di Kabupaten Aceh Timur bercocok tanam dengan mengandalkan musim hujan. Disamping itu, sebahagian besar petani dalam bercocok tanam masih menggunakan pola monokultur. Komoditi utama di bahagian ini adalah tanaman padi.

Luas areal persawahan di Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar 42.453 Ha. Namun yang didukung oleh jaringan irigasi (*teknis maupun semi teknis*) baru mencapai 40 % atau seluas 14.005 Ha. Sedangkan 60 % atau seluas 21.157 Ha masih berupa sawah tadah hujan. Keadaan ini telah mempengaruhi kapasitas produksi dan produktifitas para petani untuk mencapai hasil panen yang maksimal.

Masalah lain yang turut mempengaruhi taraf hidup petani di Kabupaten Aceh Timur adalah penjualan hasil produksi pertanian. Selama ini, petani di Kabupaten Aceh Timur sebahagian besar masih sangat bergantung pada orang lain untuk menjual gabah hasil panen mereka. Hanya sedikit para petani yang mampu mengolah gabah menjadi beras supaya langsung dapat dijual ke pasar. Komoditi unggulan pertanian lainnya adalah jagung. Kabupaten Aceh Timur memiliki 1.159 Ha jagung dengan tingkat produktifitas rata - rata 3,62 ton/Ha. Pada tahun 2006 Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur telah berhasil mengembangkan varietas jagung hibrida seluas 6.25 Ha di 11 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Faktor penggunaan teknologi di bidang pertanian juga telah mempengaruhi kemampuan produksi para petani di Kabupaten Aceh Timur. Secara umum para petani di Kabupaten Aceh Timur menggunakan alat pengolah tanah sawah yang sederhana (traktor tangan) sebanyak 223 unit yang tersebar dalam kawasan Aceh Timur.

Bidang ekonomi unggulan lainnya di bidang pertanian yaitu komoditas perkebunan. Kabupaten Aceh Timur memiliki beberapa komoditi unggulan di bidang perkebunan. Komoditi unggulan bidang perkebunan antara lain aren, kelapa dalam, pala, sugu, karet, kopi, kapuk, pinang, kakao, lada, kemiri, tebu, tembakau dan tentunya kelapa sawit. Rincian luas lahan dan produksi masing-masing komoditi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1: Jenis Komoditi Perkebunan Rakyat dan Luas Lahan serta Jumlah Produksi di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013.

No	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Aren	51,50	22,21
2	Kelapa Dalam	6.807,00	6.067,80
3	Pala	1,00	0,23
4	Sagu	140,50	163,36
5	Karet	21.374,50	15.056,85
6	Kopi	514,25	124,34
7	Kapuk	25,00	11,19
8	Pinang	2.692,00	1.604,17
9	Kakao	12.483,50	6.684,28
10	Lada	12,65	3,50
11	Kemiri	213,30	45,32
12	Tebu	13,00	990,00
13	Tembakau	15,20	19,00
14	Kelapa Sawit	19.853,50	112.046.79

Sumber: Aceh Timur dalam Angka, 2014 (diolah)

5. 2. 2 Peternakan

Terdapat 23 Desa yang penduduknya bekerja di subsektor peternakan. Rata-rata setiap keluarga di Kabupaten Aceh Timur memelihara 1 ekor ternak besar, 1 ekor ternak kecil dan 6 ekor ternak unggas. Peternakan belum menjadi komoditi unggulan disebabkan bidang ini masih berupa usaha sampingan bagi masyarakat.

Hingga tahun 2006 terdapat 2 unit pasar hewan, 1 pos Kesehatan hewan serta pembangunan baru 1 unit rumah pemotongan hewan sebagai sarana pendukung bagi aktivitas perdagangan masyarakat di bidang peternakan. Bidang peternakan sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah dengan melihat jumlah populasi ternak dan jumlah pengolahan daging di seluruh Kabupaten Aceh Timur. Tahun 2006 Kabupaten Aceh Timur menghasilkan daging sebanyak 2.402.164 kg dan telur bebek sebanyak 3.214.759.500 butir.

5. 2. 3 Perikanan

Kabupaten Aceh Timur memiliki 7.254 jiwa penduduk yang bekerja di bidang perikanan laut yang tersebar di 25 Desa dari 13 Kecamatan. Dari 7.254 jiwa tersebut, 76% atau 5.572 jiwa berstatus sebagai pekerja dan 24% atau sebanyak 1.741 jiwa berstatus sebagai nelayan pemilik perahu bermotor. Faktor konflik dan pencurian ikan di wilayah perairan Aceh Timur diduga sebagai faktor utama peyusutan hasil tangkapan ikan. Akibatnya tahun 2000 banyak nelayan Kabupaten Aceh Timur yang pindah ke Banda Aceh untuk melakukan penangkapan ikan.

Kabupaten Aceh Timur, saat ini terdapat 1 unit pusat pendaratan ikan dalam skala besar yaitu di Kecamatan Idi Rayeuek, dan terdapat 5 tempat pendaratan ikan (TPI) berskala kecil yang tersebar di Simpang Ulim, Julok, Darul Aman, Kuala Leuge Peurelak Kota dan Ranto Seulamat. Sementara pola penangkapan dan pengolahan hasil yang dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Aceh Timur masih tergolong semi moden dan tradisional. Rata – rata waktu para nelayan melaut adalah 4 hari dengan keperluan biaya antara Rp. 6,000,000,- sampai Rp. 10,000,000,- sekali melaut dengan menggunakan kapal motor.

Di bidang perikanan darat, luas areal perikanan darat di Kabupaten Aceh Timur mencapai 14.461,50 Ha (terdiri dari tambak seluas 14.455,50 Ha dan kolam seluas 16 Ha) yang terkonsentrasi di kawasan pesisir dari 13 Kecamatan

dengan jumlah petani tambak sebanyak 10.350 jiwa. Kecamatan dengan luas areal tambak terbesar adalah; Madat, Peureulak, Julok, Sungai Raya, dan Rantau Selamat. Sebahagian besar pola pengelolaannya masih bersifat tradisional (12.783 Ha) dengan pola tanam sekali panen per komoditi. Komoditi utama bidang perikanan darat adalah udang windu, udang putih, udang api – api, ikan bandeng, dan Kepiting. Masalah utama bidang perikanan darat adalah serangan penyakit pada komoditi udang.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Aceh Timur 2007, akibat bencana Tsunami telah mengakibatkan 4.940 Ha tambak milik rakyat rusak. Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias telah membantu merehabilitasi tambak milik rakyat seluas 530 Ha dan juga telah memberikan bantuan modal usaha bagi petani tambak sebesar 12.000.000,- / Ha. Bantuan modal dari BRR NAD-NIAS tersebut diberikan untuk 300 Ha tambak.

5. 2. 4 Pertambangan

Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi terdapat beberapa bahan tambang yang belum diketahui jumlah kandungannya seperti minyak, gas, tembaga, timah hitam, sen, molibdenit, emas, perak, pyrite, dan mika. Sedangkan bahan tambang yang sudah memiliki data sebagian besar berupa mineral non logam.

Kegiatan pencarian mineral ini belum dilakukan secara baik sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum dilakukan dengan sempurna oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pengelolaan sumber daya mineral ini harus dilakukan dengan baik demi pembangunan Kabupaten Aceh Timur. Pengelolaan bidang pertambangan dan energi tetap mengacu pada kondisi perekonomian dan sosial budaya masyarakat serta tetap menjaga kelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Program-program pengembangan geologi dan sumber daya mineral, pengembangan pertambangan bahan galian, dan pelestarian masih sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Arah kebijakan pembangunan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan ekonomi dan sosial budaya setempat dengan tetap menjaga kelestarian, mutu dan fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pengawasan. Selain itu meningkatkan pelayanan informasi geologi dengan melakukan kerjasama penyelidikan dan penelitian bahan tambang, kawasan rawan bencana alam beraspek geologi dan lainnya.

5. 2. 5 Pendapatan Asli Daerah

Akibat dari pemekaran wilayah, Kabupaten Aceh Timur pendapatan dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari cukai berkurang, ini terjadi sejak tahun 2003. Padahal sumber utama PAD Kabupaten Aceh Timur adalah dari hasil cukai. Cukai adalah sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur terbesar dan ia menjadi pendapatan asli daerah yang sah.

Situasi politik dan keamanan yang semakin kondusif, memiliki pengaruh yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Aceh Timur. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan daerah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur telah menargetkan pendapatan sebesar Rp. 8 Miliar pada tahun 2007. Sumber PAD dari hasil perusahaan milik daerah juga sangat potensial untuk dikembangkan. Pada tahun 2010 PAD Aceh Timur telah mencapai hasil positif, khusus untuk bahagian cukai dari target Rp.10 Miliar telah tercapai.

Walaupun demikian, PAD dari bahagian lain seperti pelelangan aset daerah mencapai Rp. 36 Miliar belum tercapai sepenuhnya. Kondisi tersebut menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, karena masih adanya berkas yang kurang lengkap dan menunggu persetujuan dari Pemerintah Kota Langsa. Sampai bulan Juni 2011 aset-aset Aceh Timur masih banyak berada di Kota Langsa, hal ini terjadi akibat dari pemekaran wilayah Kabupaten / kota di Aceh (Waspada, 29 March 2011). Pusat pemerintahan Aceh Timur sampai

tahun 2011 belum sepenuhnya kembali ke Idi Rayeuek yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten.

5. 2. 6. Sosial Budaya

Budaya masyarakat Aceh Timur yang agamis memiliki latar belakang sejarah keislaman yang cukup kuat. Wilayah Peureulak, merupakan kawasan tempat masuknya agama Islam pertama di Aceh yaitu pada tahun 800 M melalui para pedagang dari Gujarat. Meskipun demikian, dalam pengetahuan umum bahwa Islam pertama sekali masuk ke Aceh adalah di wilayah kerajaan Samudera Pasai (Aceh Utara). Hal ini terungkap dalam suatu seminar yang diadakan oleh para ahli sejarah Indonesia, Malaysia dan Australia pada tahun 1980 di Kuala Simpang. Latar belakang sejarah ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh Timur, sehingga mempengaruhi keadaan sosial budaya masyarakat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur hingga tahun 2010 adalah sebesar 359.280 jiwa terdiri dari 179,682 jiwa lelaki dan 179.598 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk Aceh Timur per tahun selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2005-2010 sebesar 3.6 %. Tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Indra Makmur yaitu sebesar 10.53 %, sedangkan terendah adalah Kecamatan Serba Jadi yaitu -12.16 % dan Nurussalam sebesar -1.95 %. Tingkat pertumbuhan penduduk yang kurang di kedua Kecamatan tersebut karena terjadi pemekaran wilayah dalam 5 tahun terakhir. Kemudian untuk Kecamatan Peunaron, Idi Timur dan Darul Falah Tingkat pertumbuhan belum dapat dihitung karena tiga Kecamatan ini baru terbentuk pada tahun 2007 (BPS Aceh Timu,2010).

Pergerakan penduduk di Kabupaten Aceh Timur terkonsentrasi di kawasan jalan nasional Medan - Banda Aceh terutama di Kecamatan Idi Rayeuek dan Peureulak karena kedua Kecamatan ini memiliki fasilitas pelayanan publik yang lebih lengkap. Penduduk yang berdekatan dengan perbatasan Kota Langsa

memiliki orientasi pergerakan ke arah Langsa. Hal ini karena selain Kota Langsa memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada Kabupaten Aceh Timur. Sebelum pemekaran kota Langsa merupakan ibukota Kabupaten Aceh Timur.

Kecamatan Peureulak adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 39.534 jiwa dengan kepadatan penduduk 124 jiwa per km². Kepadatan Penduduk di Idi Rayeuek mencapai 413 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Kecamatan Darul Falah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2,898 jiwa dan kepadatannya hanya 68 jiwa/km² (BPS Aceh Timur, 2010).

Berdasarkan data dinas tenaga kerja Aceh Timur jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar 183.119 jiwa. Angkatan kerja terbanyak terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk, Peurelax dan Madat. Adapun jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Timur yang terdaftar adalah 16.762 jiwa dengan rincian 8.595 pencari kerja laki – laki dan 8.187 jiwa perempuan. Sementara jumlah permintaan terhadap tenaga kerja hanya untuk 717 orang saja. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas pencari kerja di Aceh Timur adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (BPS Aceh Timur Tahun 2010).

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah memiliki program perlindungan sosial khususnya di bidang pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan bantuan dana operasional bagi setiap siswa sekolah di seluruh Kabupaten Aceh Timur. Namun program – program yang dijalankan belum terintegrasi secara baik dalam sistem perlindungan sosial bagi warga masyarakat.

Setelah perjanjian damai di Helsinki pada 5 Agustus 2005 lalu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten untuk menangani proses rehabilitasi dan kompensasi bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses rehabilitasi dan kompensasi bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM, terutama dari segi besaran bantuan yang diberikan. Selama ini jumlah dana bantuan yang tersedia tidak sebanding

dengan jumlah penerima manfaat. Akibatnya, mulai timbul kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

5. 2. 7 Kesehatan

Berdasarkan data dinas Kesehatan Aceh Timur dari 580 Desa/Gampong di Aceh Timur terdapat 113 Desa yang terkena penyakit muntah mencret dengan jumlah kasus sebanyak 5.390 kasus, 12 Desa terserang penyakit demam berdarah (11 kasus), dan 50 Desa telah terserang penyakit malaria (867 gejala klinis, 195 positif) serta 32 Desa yang terserang penyakit campak. Selain itu masih terdapat 2.696 kasus saspek TBC (229 orang dinyatakan positif dan 103 orang dinyatakan sembuh). Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit yang paling sering diderita oleh penduduk di Kabupaten Aceh Timur (Dinas Kesehatan Aceh Timur, 2010)

Aceh Timur telah membangun 21 unit pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) di 21 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur dengan jarak layanan rata – rata 11,7 Km. Jika menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka satu Puskemas untuk melayani 30.000 penduduk. (Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, 2010)

Dari sisi ketersediaan tenaga dokter Maupun paramedis, hingga tahun 2007 terdapat 67 orang dokter Maupun para medis yang memiliki kompetensi untuk memimpin unit – unit pelayanan Kesehatan masyarakat. Sementara untuk jumlah keseluruhan tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur adalah sebanyak 1.385 orang. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 1.334 orang dengan rasio 1:233 penduduk. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 2% yang merupakan tenaga dokter dan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kepada 352.957 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Timur melalui pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan. Jumlah tenaga Kesehatan yang terbanyak adalah tenaga Bidan (34.48%).

Jika dibandingkan dengan angka sasaran Indonesia Sehat 2010, terlihat rasio tenaga Kesehatan terhadap 100.000 penduduk masih di bawah sasaran, kecuali rasio bidan yang sudah melebihi angka sasaran, sedangkan rasio dokter umum, dokter gigi, ahli gizi dan ahli sanitasi, dibawah 75% angka sasaran. Bila dilihat dari tuntutan kerja dan perbandingan dengan jumlah pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas), maka tenaga Kesehatan yang masih kurang adalah: S2 Kesehatan, Sarjana Keperawatan, Sarjana Apoteker, Dokter gigi, Akademi Gizi, Akademi Kesehatan Lingkungan, dan lain-lain. Minimum setiap Puskesmas mempunyai satu petugas yang mengelola program Kesehatan sesuai pendidikannya. Selain masalah terbatasnya tenaga Kesehatan, distribusi tenaga medis dan Kesehatan masyarakat terkonsentrasi di kawasan Kecamatan biasa dan hanya sedikit di Kecamatan terpencil.

Jika menggunakan standar nasional, satu orang dokter untuk melayani 2.500 jiwa maka jumlah dokter baru terpenuhi 50 % saja. Namun, jika dilihat dari sisi penempatan tenaga Kesehatan semua dokter Maupun para medik yang memiliki kompetensi terlihat bahwa lebih banyak pada daerah – daerah yang dekat dengan kota Langsa dan ibu kota Kecamatan, sementara untuk daerah pedalaman jumlahnya sedikit.

Setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan rendahnya derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Pertama, adalah faktor rendahnya taraf hidup masyarakat yang mempengaruhi pola hidup. Kedua, kualitas infrastruktur fisik pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat masih rendah. Ketiga, sistem sanitasi dan penyaluran air bersih bagi warga masyarakat masih kurang. Keempat, tenaga Kesehatan bertugas di unit- unit pelayanan Kesehatan masyarakat masih kurang dari segi kuantitas dan kapasitas.

5. 2. 8. Palayanan Publik

Kabupaten Aceh Timur telah memiliki jalan sepanjang 1.797,4 Km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 112 Km, jalan provinsi sepanjang 116,8 Km

dan jalan Kabupaten sepanjang 1.568,60 Km. Jalan Kabupaten yang telah diaspal di Kabupaten Aceh Timur adalah sepanjang 105,30 Km, sedangkan jalan yang berbatu adalah sepanjang 500,4 Km, jalan kerikil sepanjang 804 Km dan jalan dengan permukaan tanah sepanjang 116,1 Km. Sementara untuk panjang jembatan adalah 2.440 m dimana 810 m dalam keadaan baik, 410 m dalam keadaan sedang, dan 1.220 m dalam keadaan rusak.

Listrik di Kabupaten Aceh Timur dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keperluan listrik hampir memenuhi keperluan masyarakat disemua Kecamatan. Di wilayah Aceh Timur memiliki 39.744 pelanggan dengan 37.496.505 KWH. Kecamatan Peureulak memiliki jumlah pelanggan paling banyak. Produksi listrik yang dibangkitkan adalah 20.462.888 KWH. Sedangkan keperluan listrik untuk dijual adalah 89.390.299 KWH. Tenaga listrik yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur masih berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Langsa, kecuali Kecamatan Serba Jadi memiliki mesin pembangkit listrik sebanyak 2 unit. Mesin pembangkit listrik yang dimiliki oleh Kecamatan Serba Jadi dapat memproduksi listrik sebesar 17.015 KWH dengan 140 KWH daya yang terpasang.

Tempat pengolah air bersih di Kabupaten Aceh Timur terdapat di Kecamatan Lhok Nibong, Peurelak Kota, Ranto Peurelak, Ranto Selamat dan Bireum Bayeun. Air bersih tersebut disalurkan pada 100 Desa dengan jumlah pelanggan 5.437 KK. Kapasitas penyaluran air ideal untuk keperluan seluruh penduduk di Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar 360.000 m³/hari. Sementara kemampuan pemerintah saat ini hanya mampu menyalurkan sebesar 12.528 m³/hari yang disalurkan dari 5 instalasi air bersih PDAM di Lhok Nibong, Peurlak Kota, Ranto Peureulak, Bayeun, dan Bireum Bayeun. Sehingga kekurangan suplai air bersih masih sebesar 347.472 m³/hari atau hanya mampu memenuhi 10 % dari total keperluan seluruh Kabupaten Aceh Timur.

5. 2. 9 Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur masih mengalami berbagai masalah mulai dari segi proses, substansi pelaksanaan Maupun pengawasannya. Di samping itu, pelibatan masyarakat Maupun koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam proses perencanaan pembangunan masih sebatas formalitas sehingga mengakibatkan proses pengambilan keputusan tidak dapat berlangsung secara memuaskan. Sejak terbentuknya Kabupaten sampai saat ini Aceh Timur telah dipimpin oleh 24 pimpinan (bupati). Adapun nama-nama pimpinan Aceh Timur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2: Nama-Nama Kepala Daerah di Aceh Timur

NO	NAMA BUPATI	PERIOD
1	T M. Daoedsjah	1945-1946
2	T. Radja Pidie	1946
3	T. A l i	1946
4	T. A. Hasan	1946-1948
5	Tgk. Maimoen Habsjah	1948-1952
6	Ibnu Saadan	1952
7	Zaini Bakri	1952-1953
8	T. Madja Purba	1953-1954
9	M. Kasim	1954-1955
10	Moenar Sastro Amidjojo	1955-1956
11	Kamaroesid	1956-1958
12	Tgk. Mohd. Daoed	1958-1959
13	T. Djohansjah	1959-1967
14	Muhammad Hasbi Usman	1967
15	Muhammad Nurdin	1967-1973
16	Drs. Ayub Yusuf	1973-1977
17	Drs. Zainuddin Mard	1977-1983
18	Drs. T. M. Bachrum	1983-1984
19	Drs. Zainuddin Mard	1984-1989
20	M. Noeh. AR	1989-1994
21	Alauddin. AE	1994-1999
22	Drs. Azman Usmanuddin, MM	1999-2006
23	Ir. Azwar AB, M.Si	2006-2007
24	Muslem Hasbalah	2007-2011
25	Hasballah M. Thaib	2011-2016

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Di sisi lain, peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepekaan kalangan DPRK dalam menyerap aspirasi masyarakat. Maupun fungsi pengawasan terhadap aparat pemerintah.

Konflik bersenjata yang terjadi di masa lalu, telah menjadi kenangan yang susah untuk dilupakan oleh sebahagian masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Trauma psikis. Maupun cacat badan bagi sebahagian warga tidak dapat dilupakan begitu sahaja. Sisi lain, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga sangat rendah akibat terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Penegakan undang-undang yang belum adil dan tulus serta susahnyanya mendapat keadilan bagi masyarakat menyebabkan menurunnya kredibilitas pelaksana undang-undang. Maupun institusi pelaksana undang-undang di mata masyarakat. Pemberlakuan hukuman terhadap pelaku yang terlibat korupsi tidak dilaksanakan secara murni, efektif dan adil, termasuk penyelesaian berbagai kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat.

Pasca penandatanganan perjanjian perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki-Finlandia, stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Aceh Timur semakin baik. Kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di hadapan orang banyak mulai dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung telah berjalan dengan aman dan damai.

Namun demikian, sejak periode Februari 2007-2011 kasus-kasus kriminal khususnya perampokan, penodongan, pembunuhan, dan penjarahan yang menggunakan senjata api kembali meningkatkan di wilayah ini. Kemiskinan dan kesulitan mencari nafkah diyakini sebagai penyebab utama yang melandasi aksi-aksi tersebut.

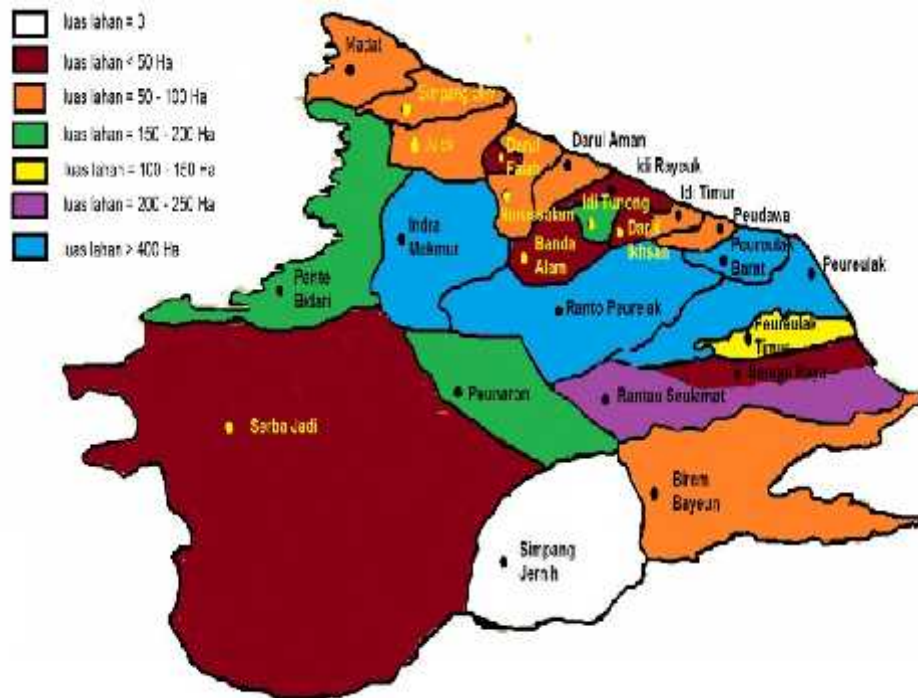
5.3 Peta Pemanfaatan Areal Kebun Sawit Mantan Kombatan GAM dan Masyarakat Korban Konflik

Hasil penelitain Asnawi, dkk. (2013) tentang Pengembangan Coloring Economic Models, Satu Strategi Kemitraan antara Sektor Karet dan Kelapa Sawit sebagai Penggerak Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh, menyebutkan bahwa Aceh Timur memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 16.573 Ha¹ dengan produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal sawit rakyat Aceh Timur tahun 2013 yaitu 19.853,50 Ha yang tersebar di 24 Kecamatan (BPS Aceh Timur, 2014).

Luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh Timur sekitar 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut. Dalam gambar peta yang disajikan terlihat bahwa hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Simpang Jernih. Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak barat mendapat bantuan lebih dari 400 Ha. Yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi, Darul Falah, Banda Alam, Idi Rayeuk dan Darul Ihsan yaitu kurang dari 50 Ha. Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Timur, jumlah bantuan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah mencapai 18,8 %. Besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap orang adalah rata-rata seluas 1,1 Ha. Data luas lahan, lokasi kecamatan dan Desa, jumlah penerima serta jumlah kelompok pada masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran berikut.

¹ Jumlah ini berbeda dengan yang didapatkan oleh tim peneliti ini melalui studi dokumen Dinas Perkebunan 2014, di mana luasnya mencapai 19.798 Ha.

Gambar 5.2: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik setiap Kecamatan di Aceh Timur



Menurut Nasruddin Abubakar, mantan wakil bupati (17/5/2014) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik, melalui bantuan Kementerian BUMN. Luas areal yang direncanakan sebesar 15.000 Ha atau senilai 2 milyar. Namun program tersebut tidak dapat direalisasikan, karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh Timur dalam memenuhi persyaratan administrasi ketika itu (Aceh Timur belum memiliki data yang akurat tentang kelompok penerima manfaat, sementara lahannya sudah ada).

Sebenarnya pada awalnya Koperasi Bina Nanggroe sudah menyediakan data lahan dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan relative valid, namun oleh Muslem Hasbullah (Bupati Aceh Timur ketika itu) menolak Koperasi Bina Nanggroe dan mengusulkan koperasi yang lain. Kedua

kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga sampai akhir jabatan pemerintahan Muslem dan Nasruddin, program bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas realisasinya. Padahal jika program pemberdayaan tersebut berjalan, maka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur ke depan.

Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui pemberian lahan dan bantuan penanaman sawit sangat bagus, akan tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat kreativitas penerima untuk mengembangkan diri mereka karena terbiasa dengan hanya menerima bantuan yang dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan. Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan hanya berdampak positif dalam jangka pendek. Di mana masyarakat penerima bantuan akan cenderung menjual apa yang mereka dapatkan. Seharusnya kebijakan pemberian bantuan untuk pemberdayaan harus dilakukan dengan pemberian kapasitas penerima melalui pemberian pendidikan dan pelatihan serta membangun kapasitas masyarakat supaya mereka menganggap bahwa program bantuan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara menurut Pak Ibrahim, Ka TU Dinas Perkebunan Aceh Timur (17/5/2014), Aceh Timur mempunyai lahan sekitar 115 Hektare yang dimanfaatkan untuk penanaman sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut dikelola dengan sumber dana reguler untuk pembukaan lahan dan penanaman sawit. Akan tetapi terdapat satu kendala, yaitu masalah koordinasi antara Dinas Perkebunan Aceh Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah Provinsi sudah menDesain programnya sedemikian rupa, tetapi tiba-tiba disuruh buat Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat, karena untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah ada, lokasinya sudah jelas. Biasanya pihak dinas (Provinsi) menyuruh dinas kabupaten untuk membuat usulan, tetapi formalitas saja dari kami. Akibatnya kami tidak mau, kami suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya

lahan, provinsi buat program sendiri tanpa menganulir program ke kabupaten”.

Beliau melanjutkan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012, ada lahan di Julok dan Pante Bidari, luas areal 100 hektare, dan Pengelolanya (diketua oleh si Baret). Masyarakat korban konflik dan mantan kombatan mengusulkan bantuan langsung ke dinas provinsi, namun mereka tidak menyebutkan secara terperinci identitas mereka apakah mereka korban konflik atau kombatan. Akan tetapi kedua kriteria tersebut ada sama mereka (pengurus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan ke dinas, tetapi ada juga di antara mereka yang mengusulkan bantuan ke Dewan Provinsi (anggota DPR) untuk mendapatkan dana ‘aspirasi’ dewan. Dalam perjalanannya, sebahagian mereka ada yang mendapatkan bantuan (dari aspirasi dewan), tetapi juga tidak diberitahukan ke dinas kabupaten, mereka mengurus sendiri langsung ke Banda Aceh, tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, padahal areal lahan yang diusulkan berada di dalam kawasan Aceh Timur. Oleh sebab itu, dapat kami katakan bahwa areal lahan sawit untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada.

Selain itu, pada tahun 2010 Irwandi (Gubernur) juga memberikan bantuan pembukaan lahan dan penanaman sawit seluas 40 Hektare, yang berlokasi di Buket Makmur Julok Aceh Timur. Dikordinir oleh si Mamplam. Program ini didampingi oleh pak Basarudin² dari Dinas Perkebunan Aceh Timur. Berdasarkan kenyataan ini, menjelaskan bahwa di Aceh Timur telah diberikan bantuan untuk kelompok miskin, yang terdiri dari korban konflik dan mantan kombatan GAM. Mereka umumnya ketika memohon bantuan mengatasnamakan Komite Peralihan Aceh (KPA) / Parti Aceh (PA)³, sehingga pihak dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai hari ini yang paling sering datang ke kantor untuk minta

².Pak Basarudin berstatus sebagai pegawai pada Unit Pengelola Program Pertanian (UPPP), Khusus sawit dari Dinas Perkebunan Aceh Timur.

³ Kedua organisasi ini merupakan organisasi sivil dan politik GAM setelah perjanjian perdamaian sebagai bentuk nyata transformasi GAM.

bantuan/proyek adalah orang KPA/PA, sementara masyarakat biasa jarang sekali datang ke kantor.

Namun demikian, jumlah areal lahan sawit yang disebutkan di atas tidak diperuntukkan secara khusus kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik, tidak terlihat secara jelas terpisahkan dari areal sawit masyarakat lainnya, karena semua masyarakat menganggap dirinya korban konflik. Seperti diutarakan oleh masyarakat dalam FGD (28/9/2014):

“Jangan ditanya berapa jumlah korban konflik yang menerima bantuan dan anggota koperasi. Semua masyarakat Aceh, khususnya kami di Aceh Timur adalah korban konflik, termasuk guru dan polisi. Ketika konflik berlangsung di Aceh jika ada masyarakat yang tidak merasa dipukul oleh aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan merasa malu karena dianggap berarti tidak melawan pemerintah Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu”.

Supaya program penanaman sawit yang dilaksanakan berjalan lebih efektif, Pemerintah Aceh Timur telah membangun satu sistem yang dinilai baik. Salah satunya adalah melalui Program Peumakmu Gampong. Program ini direncanakan akan berlangsung mulai tahun 2014. Mekanisme pelaksanaannya adalah menyeleksi petani yang layak untuk dibantu. Namun sebelum bantuan diberikan, kelompok sasaran terlebih dahulu diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, selanjutnya dilakukan pendampingan secara kontinue. Program ini akan dilaksanakan di Kecamatan Peunaron, Indra Makmu, Birem Bayeun, Ranto Perlak dan Ranto seulamat.

Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan utama yang dialami oleh para petani sawit di Aceh Timur, yaitu: pertama, hama gajah dan hama wereng. Kedua, jalan menuju ke lokasi sawit sangat sukar untuk diakses. Ketiga, ketersediaan pupuk yang tidak memadai, kadang-kala pupuk ada tapi harganya mahal, kadang-kadang pesediaannya tidak ada. Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat dari serangan hama dan kurang pupuk. Kelima, Harga jual sawit tidak terkontrol, kadang-kadang

harganya merosot sangat murah mencapai Rp 500 (wawancara dengan mukhlis, petani sawit nurussalam).

5.4 Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatant GAM Dan Korban Konflik Melalui Komoditi Sawit

Pemberdayaan mantan kombatant GAM dan korban konflik telah dilakukan sejak tahun 2006 dalam berbagai bentuk bantuan, baik ekonomi maupun sosial. Namun untuk ekonomi produktif melalui pertanian khususnya sawit dimulai pada tahun 2009. Jumlah kecamatan yang menerima bantuan penanaman kelapa sawit pada tahun 2009 yaitu 6 kecamatan dengan total luas 1100 Ha dan jumlah petani 590 orang. Kecamatan-kecamatan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2009 adalah; Idi Tunong, Indra Makmur, peureulak, Perlak Barat, Ranto Peureulak dan Ranto Seulamat.

Menurut Ahmadi Mustafa, S. PdI (Ketua BP2A) Aceh Timur bahwa pemberdayaan mantan kombatant Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur dilakukan dalam berbagai macam cara antara lain (wawancara dengan Ahmadi Mustafa, 15 Juli 2014):

1. Pada tahun 2006-2011 bantuan rumah yang sudah jadi 4.100 unit rumah
2. Pada tahun 2007 - 2009 ada bantuan diat yang diberikan oleh pemerintah kepada para kombatant GAM dan korban konflik sebesar Rp. 3.000.000.-
3. Pada tahun 2007 – 2009 juga ada bantuan untuk orang cacat akibat konflik sebesar Rp. 10.000.000.-
4. Pada tahun 2009 ada bantuan mukena dan sajadah kepada teungku dayah.
5. Pada tahun 2010 ada pelatihan perbengkelan untuk 20 orang peserta yang dipilih secara professional dan selesai pelatihan diberikan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000.-
6. Pada tahun 2011-2013 ada bantuan becak sebanyak 13 buah

7. Pada tahun 2012 bantuan Tugu Perdamaian didirikan di Jalan Medan Banda Aceh Kecamatan Darul Aman Idi Cut.
8. Pada tahun 2013-2014 ada bantuan Jaminan sosial sebesar Rp. 3.000.000.- setahun dan telah melayani sebanyak 200 orang.

Namun jika dilihat dari jumlah mantan kombatan GAM dengan realisasi bantuan rasionya masih sangat kecil. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3: Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan kepada GAM

NO	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	KET
1	DATA USULAN KE BP2A PUSAT			
	Data Mantan Kombatan GAM (TNA)	5,148	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Tapol/ Napol	367	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Janda Dan Ahli Waris GAM (TNA)	1,335	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Jaminan Sosial Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	1,570	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Diyat	4,344	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Rumah Dibakar/ Dirusak Akibat Konflik	4,854	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Cacat Berat/ Ringan Akibat Konflik	8,718	Orang	Masih Tahap Usulan
2	REALISASI BANTUAN DALAM TAHUN 2013			
	Bantuan Rumah Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	25	Unit	75,000,000
	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	200	Orang	3,000,000

	Bantuan Anak Yatim Korban Konflik	10	Orang	200,000
	Bantuan Sepeda Motor Modifikasi Merk Honda Bagi Penyandang Cacat Akibat Konflik	6	Unit	-

Sumber: Dokumen BP2A Aceh Timur, 2014

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit, masyarakat penerima bantuan di sektor perkebunan sawit saat ini mulai tersenyum menyongsong masa panen. Penduduk Aceh Timur yang menerima bantuan sawit sangat serius dalam mengelola sawit bantuan APBA 2008, saat ini sedang bersiap menyongsong masa petik tandan sawit untuk dirupiahkan (Tabloid Tabangun Aceh, 2011).

Menurut informen yang diwawancarai bahwa program bantuan sawit sangat membantu peningkatan perekonomian mereka dalam memenuhi keperluan sehari-hari, baik kepada petani maupun pemuda dan masyarakat sekitarnya. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas dan tidak melebihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi (ayek) bahwa:

“Dengan adanya program bantuan sawit dari Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi perekonomian mantan kombatan dan korban konflik sangat terbantuan. Kondisi sawit kami sudah masuk tahap produksi dengan jumlah 2.5 ton perhektar per 15 hari. Penghasilan dari kelapa sawit perbulan rata-rata perhektar mencapai Rp. 1.000.000.-. Dan para pemuda dan masyarakat sekitar juga memperoleh pendapatan perhari dari bekerja sebagai pendodos dan pengangkut sawit sebesar Rp. 200.000,- per hari perorang”.

Selain itu, dampak positif terhadap keamanan juga meningkat, dimana tingkat kriminalitas menurun, kalau kita parkir motor di depan rumah tidak hilang lagi. Demikian juga buah sawit sudah tidak hilang karena semua pemuda sudah punya kerja sendiri. Hal ini mungkin juga disebabkan masyarakat di sekitar kampung tersebut dapat menambang minyak dengan menggali sumur bor secara manual/tradisional. Sehingga semua pemuda ada kegiatan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Keberhasilan bidang sawit meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan bidang lain para pengelola sawit. Rata-rata petani pengelola kebun sawit sudah memiliki kendaraan sendiri (motor) bahkan di antara mereka ada yang sudah memiliki kendaraan roda empat (mobil). Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah masyarakat di Desa tersebut. Kondisi rumah yang ada sekarang sudah layak huni dilihat dari segi luas dan konstruksi bangunan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah:





Gambar 5.3 Kondisi rumah petani sawit di Aceh Timur

Senada dengan kenyataan di atas, informen pada lokasi lainnya juga mengatakan hal yang serupa bahwa melalui bantuan tanaman sawit tingkat pendapatan masyarakat meningkat, dimana biaya pendidikan anak-anak sudah terpenuhi. Dengan adanya panen sawit ini kebutuhan rumah tangga dan jajan anak-anak sudah tidak repot lagi. Jika pun belum datang masa panen, mereka mudah mendapat pinjaman dari toke, karena sumber bayarnya sudah jelas. Salah seorang informan berinisial M.A dalam Fokus Group Discussion menyatakan bahwa:

“Sekarang jika anak kami mau jajan petik aja satu tandan sawit jika dijual ada uang 50 ribu sudah cukup untuk dia. Kalau perlu uang untuk beli ikan tinggal petik satu tandan sudah mencukupi untuk membeli satu kilogram ikan basah (Hasil FGD, di Seuenubok Buya, 28 September 2014)”.

Tingkat pendapatan mantan kombatan GAM dan korban konflik dari usaha perkebunan sawit program bantuan pemerintah rata-rata sebesar Rp. 1.755. 547,- perbulan. Tingkat pendapatan tersebut diperoleh dari produksi kelapa sawit yang baru berumur 4-5 tahun. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4: Rata-rata Pendapatan Petani dari Bantuan Sawit per Bulan
di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan per petani (Ha/Orang)	Hasil Sawit (Kg/Ha) ^(*)	Hasil Sawit per Petani (Kg/Orang)	Harga (Rp/Kg)	Pendapatan (Rp/Orang)
1	Idi Tunong	93	154	1.7	800.00	1.324.73	1,000.00	1,324,731.18
2	Inora Makmu	250	500	2.0	900.00	1,800.00	1,000.00	1,800,000.00
3	Peureulak	100	200	2.0	800.00	1,600.00	1,000.00	1,600,000.00
4	peureulak barat	63	96	1.5	1,000.00	1,523.81	1,000.00	1,523,809.52
5	Ranto Peureulak	59	100	1.7	1,230.00	2,084.75	1,000.00	2,084,745.76
6	Ranto Seulamat	25	50	2.0	1,100.00	2,200.00	1,000.00	2,200,000.00
Total				10.9	5,830.00	10,533.29		10,533,286.47
Rata rata				1.8	971.67	1,755.55		1,755,547.74
Keterangan (*): Panen pada saat umur sawit 4 - 5 tahun								

Sumber: Diolah dari sumber primer, 2014.

Selain itu lahan sawit juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan ekonomi tambahan melalui penanaman tanaman muda dan pemeliharaan binatang ternak. Yang pertama dilakukan sebelum sawit berbuah untuk penanaman tanaman muda, yang dapat membantu perekonomian sehari-hari mereka. Apabila sawitnya sudah mencapai umur 3 tahun maka masyarakat petani juga memanfaatkan areal tersebut untuk memelihara ternak seperti sapi dan kambing. Dari peternakan diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dalam masa 6 bulan pemeliharaan. Satu sapi dapat diperoleh keuntungan mencapai 5 juta jika dirawat dengan makanan yang cukup. Namun tidak semua petani memiliki peliharaan ternak sendiri, sebagian mereka memelihara ternak orang yang keuntungannya harus dibagi dua (FGD, 27 September 2014).

Namun demikian kenyataan di atas belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM, karena di antara mereka yang memperoleh bantuan juga ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman sawit. Mereka memanfaatkan bantuan untuk keperluan konsumtif jangka pendek. Bibit dan bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dijual, dan uangnya dipakai untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Bahkan lahan

pertanian yang sudah disiapkan untuk tanaman sawit juga dijual. Ini telah terjadi dikawasan Alue Bu Tuha, Aceh Timur. Dimana seorang petani telah membeli lahan dan bantuan sawit dari petani lainnya yang berjumlah 2.5 Ha (wawancara dengan Asnawi, 26 September 2014).

Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sekarang yang kita khawatirkan adalah bantuan yang sedemikian banyak dari pemerintah tidak digunakan secara baik oleh masyarakat. Sebagai contoh kita berikan bantuan bibit, bibitnya di jual, kemudian uangnya dipakai untuk konsumtif dan uang itu akan habis dalam waktu yang tidak lama. Ketika pemerintah memberikan biaya tanam bibit, uangnya diambil untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena bibit yang diberikan sebelumnya sudah di jual dan lahannya pun ikut dijual kepada orang kaya”.

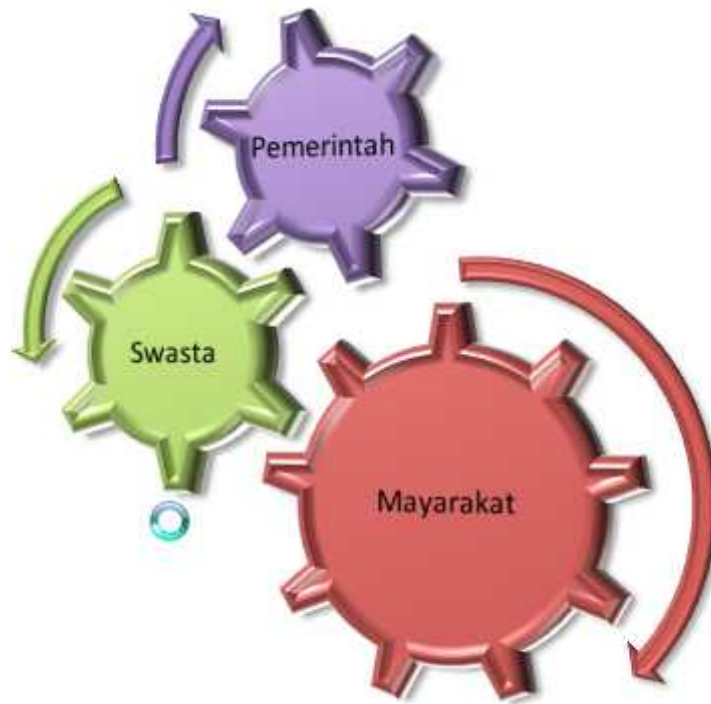
Selain itu juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban konflik dan mantan GAM dilakukan secara bertahap. Akibatnya sampai saat ini masih ada di antara mereka yang belum memperoleh bantuan. Baik bantuan pertanian (sawit) maupun bantuan lainnya, seperti yang terlihat pada table 6.3 di atas. Jumlah masyarakat korban konflik dan mantan GAM belum sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan. Akibatnya keadaan ekonomi masyarakat juga belum stabil, sebagian dari mereka masih sering menjumpai kepala dinas untuk meminta uang, terutama pada hari-hari besar Islam (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha) dimana pada dua momentum ini juga dikenal hari *megang* yang memerlukan banyak uang untuk membeli daging hewan untuk dimakan. Dalam keadaan seperti ini sebagian mantan kombatan GAM sering meminta uang ke dinas-dinas. Saifuddin menyebutkan bahwa:

“menjelang megang dan hari raya saya selalu harus putar otak untuk mengatasi masalah peminta-minta yang datang ke kantor untuk minta uang hari raya dan uang megang bahkan menjelang megang saya tidak bisa terus berada di kantor. Kalau saya tidak berada di kantor mereka menelpon, disinilah perlu seni untuk berkomunikasi dan menolak secara halus. Jika saya lihat fenomena yang terjadi selama ini, saya berpendapat masyarakat kita mengalami masalah

kerusakan mental dan moral atau degradasi moral. Kita telah kehilangan panutan daripada pemimpin-pemimpin kita” (Wawancara, 17 Oktober 2014).

Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik pemerintah Aceh Timur telah merancang satu model pembangunan yang integratif. Model integrasi ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Hiharapkan ketika masyarakat petani sudah mulai panen hasil pertaniannya, harga jual ke pasar tidak dipermainkan oleh pihak swasta (pedagang pengumpul, pedagang kecil dan pedagang besar). Yang menyebabkan harga turun drastis dan merugikan petani. Dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus berperan aktif untuk mengontrol pihak swasta agar jangan sampai merugikan petani kita.

Selain itu model integratif yang dirancang oleh pemerintah Aceh Timur yaitu menggabungkan pertanian dan peternakan. Dimana lahan pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk peternakan seperti ternak lembu dan kambing. Hal ini dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama antar Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan untuk memastikan bantuan yang diberikan diterima oleh satu kelompok untuk memanfaatkan kedua bantuan tersebut (perkebunan dan peternakan). Dengan demikian para petani dapat memperoleh keuntungan ekonomi ganda dan dapat menopang ekonomi mereka sebelum masa panen hasil pertanian (wawancara dengan saifuddin, 17 Oktober 2014). Model yang dimaksudkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.4: *Wheel Integrative Development Model*

Model ini diharapkan oleh pemerintah Aceh Timur dapat menyamakan visi dan misi antara tiga komponen tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh Timur menjadi tanggung jawab bersama. Namun model ini baru mau diterapkan pada tahun 2014. Sehingga kajian ini belum memperoleh efek dari model ini.

5.5 Dampak Sawit Terhadap Kehidupan Sosial Dan Lingkungan

5.5.1 Dampak Sosial

a. Interaksi Sosial

Pelaksanaan Program sawit tidak menimbulkan kontraversi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya lokal masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mempersoalkan kenapa harus sawit. Menurut masyarakat “Namanya juga bantuan, jadi apa yang ada diterima

dulu. Mana tahu sekarang dapat bantuan sawit suatu saat nanti akan dapat bantuan jenis tanaman lain”.

Selain itu, bantuan sawit juga belum menimbulkan konfrontrasi antara masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Namun sikap antagonism mulai muncul dalam masyarakat, karena masih banyak masyarakat merasa diri berhak mendapat bantuan tetapi tidak menerimanya. Bahkan sebagian masyarakat yang telah diajak masuk kedalam kelompok untuk mendapat bantuan, tetapi tidak memperoleh bantuan ketika bantuan telah diberikan oleh pemerintah. Mereka dimarjinalkan dari kelompok usulan bantuan tanpa diberikan alasannya.

Walaupun demikian, sebagian informen menyatakan, “Saya tidak cemburu walaupun tidak mendapat bantuan sawit karena itu sudah rezeki orang”. Terdapat beberapa sebab masyarakat tidak mendapatkan bantuan sawit, diantaranya:

1. Tidak ada di Desa ketika dibentuk kelompok dan diusulkan bantuan
2. Tidak dimasukkan dalam kelompok atau dipinggirkan
3. Tidak memiliki lahan
4. Dimasukkan dalam kelompok, tetapi bantuan diselewengkan anggota kelompok yang mendominasi.

Kenyataan ini dapat dipahami dari pernyataan para informen yang diwawancarai. Diantaranya:

“Saya tidak mendapat bantuan sawit dan tidak ada nama dalam kelompok karena pada saat pembentukaan kelompok saya tidak ada di kampong karena sudah ditangkap dan berada di rumah tahanan (LP) karena kasus kepemilikan senjata api” (Racun, 17 Mei 2015).

Selanjutnya terdapat juga pembentukan kelompok atas inisiatif beberapa orang dalam mayarakat dengan mengajak teman terdekat atau keluarga. Pembentukan kelompok tidak dimusyawarahkan di tingkat gampong, sehingga

sebahagian masyarakat tidak tahu ada program bantuan, dan mereka tidak diikutkan dalam kelompok walaupun mereka tergolong dalam masyarakat miskin. Ini terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan dipandang “bodoh” oleh masyarakat lain.

Saya tidak tahu ada bantuan sawit, tetapi saya tahu ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sawit. Katanya mereka cari sendiri bantuan kepada pemerintah dengan membentuk kelompok. Kemudian saya minta untuk dimasukkan ke dalam kelompok katanya anggota sudah cukup. Seorang informen lainnya menyatakan saya pernah diminta KTP untuk dimasukkan dalam kelompok, tetapi setelah bantuan diperoleh saya tidak lagi diberitahu. Mereka membagikan antara sesama mereka saja (*dibagi ajau sabee kedroe-droe jih inan*) (FGD, 18 Mei 2015).

Berkaitan dengan kepemilikan lahan, menurut seorang ketua kelompok bahwa masyarakat yang tidak mendapat bantuan sawit karena mereka tidak memiliki lahan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur (bapak Ibrahim), bahwa masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak mendapat bantuan sawit karena pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembukaan lahan. Persoalan lahan pun bukan wewenang dinas, akan tetapi ada dinas terkait lainnya yang menyediakan lahan.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pemberian bantuan sawit kepada masyarakat oleh pemerintah tidak dibagikan kepada seluruh masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM. Walaupun demikian konflik sosial tidak mengemuka sampai pada tahap konfrontasi. Ini karena sebahagian masyarakat masih berpegang pada nilai budaya Aceh, seperti yang dinyatakan oleh informan berikut;

“Cemburu pasti ada karena kami tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun kami tidak sampai membenci kelompok dan orang yang menerima bantuan tersebut. Karena kami berpegang pada prinsip yang telah dituangkan dalam pepatah Aceh “*Uneun Tak Wie Tarek*” (potong dengan tangan kanan tarik dengan tangan kiri)”.

Pepatah ini bermakna masyarakat memegang pada prinsip dan nilai kemandirian dan kerja keras orang Aceh, jika ingin sukses harus berusaha dan bekerja keras bukan hanya mengharap bantuan orang lain.

Selain itu, aktivitas penanaman sawit telah membawa dampak positif bagi masyarakat petani, yaitu mengurangi satu kebiasaan negatif masyarakat, banyak menghabiskan waktu di warung kopi untuk membicarakan permasalahan – permasalahan yang tidak penting mulai dari permasalahan Desa sampai permasalahan dunia yang tidak ada solusinya. Kenyataan ini masyarakat Aceh mengistilahkannya “Seumula ateuh meh” (Bercocok tanam di atas meja kupa).

“Selama memiliki kebun sawit kami tidak lagi menghabiskan waktu yang lama pada siang hari di warung kopi, kecuali untuk minum dan berbincang sebentar, setelah itu langsung ke kebun sawit untuk bekerja. Akan tetapi untuk berinteraksi dengan masyarakat terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial tidak mengalami perubahan. Kami masih bisa mengikuti gotong royong dan acara-acara di kampung (FGD, 15 Mei 2015).

Masyarakat secara umum tidak mendapatkan bantuan dari kelompok GAM yang mendapat bantuan sawit akan tetapi untuk anak yatim mereka kasih terutama menjelang hari raya dan hari megang. Di Desa Buket Beureghang belum ada program bantuan sosial yang khusus dipotong dari hasil penjualan sawit untuk program sosial. Akan tetapi di Desa Alue Udep ada mengumpulkan dana sosial dari hasil panen sawit. Mekanisme pemberian bantuan sosial, terutama untuk sumbangan pembangunan masjid sepuluh rupiah perkilogram. Namun ada desa yang dulunya memberi bantuan sosial berdasarkan mekanisme tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi seperti di Suka Mulya.

Dampak perubahan sosial lainnya lain dari adanya kebun sawit yaitu terhadap gaya hidup. Dampak ini bisa dilihat dari salah satu pemilik kebun yang sudah menjadi toke besar. Orang yang ada uang pasti gaya hidupnya berubah, walaupun tidak banyak sedikit banyaknya ada. Misalnya karena sudah ada uang panen sebulan dua kali orang tersebut sudah berani

ambil kredit mobil yang akhirnya memudahkan transportasi dan bisa berlibur dengan keluarga pada akhir pekan untuk makan – makan di luar atau untuk berekreasi.

Dampak perubahan gaya hidup juga dapat dilihat dari kebiasaan minum kopi. Kebiasaan minum kopi untuk orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi biasanya mencari tempat yang mewah dan berkelas, namun hal ini tidak terjadi di Kawasan Rantau Panjang dan Alue Bu. Para penerima bantuan sawit yang tingkat pendapatannya sudah lebih baik masih minum kopi di warung kopi di desanya bersama dengan masyarakat lainnya. Namun jika pemilik kebun sawit tinggalnya di desa lain maka sebelum ke lokasi kebun sawit dia sudah minum di kampungnya terlebih dahulu. Namun sesekali ada juga dia minum di lokasi sawit.

Pola konsumsi masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan dan hal ini sudah lumrah karena daya beli masyarakat sudah tinggi. Dulu kalau mau beli kulkas atau HP tidak ada uang, sekarang sudah ada uang dari hasil panen sawit. Jadi masyarakat sanggup membeli kebutuhan tersebut. Sekarang walaupun kayu bakar banyak di sekitar rumah masyarakat memilih memasak dengan Ricecooker karena lebih praktis. Bahkan sekarang ada yang sudah membangun rumah baru yang permanen.

Setelah menerima bantuan sawit dari pemerintah anggota kelompok yang pernah menerima bantuan sawit juga pernah menerima bantuan lainnya dari desa seperti raskin, bibit kacang kuning, kambing dan bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

b. Pendidikan

Penanaman sawit selain memiliki dampak terhadap interaksi juga memiliki dampak terhadap pendidikan anggota keluarga. Melalui hasil sawit para orang tua sudah dapat merancang pendidikan anak. Namun saat ini para orang tua belum memilih sekolah-sekolah yang unggul, akan tetapi

pertimbangan pilihan pendidikan anak masih pada jarak tempuh yang terjangkau yang berada di sekitar Aceh Timur. Sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tinggal masih menjadi pilihan utama. Akibatnya di lokasi yang tidak memiliki Sekolah Tingkat lanjutan Atas (SLTA) masyarakat hanya menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMP saja yang terletak dipusat kecamatan. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di dusun Suka Mulya. Walaupun akses ke sekolah tidak terlalu susah artinya tidak perlu mengarungi sungai dan melawati jembatan yang rusak namun masyarakat tetap tidak menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat tinggi. Setelah tamat SMP anak-anak mereka langsung bekerja membantu orang tua dikebun dan di ladang, atau bekerja ditempat orang lain sebagai buruh tani.

Dengan adanya sawit, pendidikan anak-anak petani penerima bantuan akan terbantu, misalnya untuk kebutuhan sekolah anak sudah terpenuhi dari hasil panen. Kalau analogi sederhana untuk bayar uang sekolah sebulan sekali - masyarakat yang punya sawit 15 hari sekali panen, sehingga tidak ada persoalan dengan biaya pendidikan anak-anak mereka. Intinya dengan adanya bantuan sawit sangat terbantu pendidikan anak.

c. Kesehatan

Dampak sawit terhadap kesehatan tidak begitu signifikan. Dari segi pola kesehatan lingkungan, masyarakat belum pernah menghadapi ancaman kesehatan akibat dari penanaman sawit bantuan tersebut. Semenjak penanaman sawit tersebut belum pernah ada kasus wabah penyakit yang menimpa masyarakat.

Selain itu pemerintah juga telah menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program BPJS Kesehatan atau dulu di Aceh juga telah pernah ada program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA). Sehingga masalah kesehatan tidak menjadi begitu bermasalah. Masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tersebut daripada memilih ke pengobatan spesialis walaupun sebenarnya mereka mampu mengeluarkan biaya untuk berobat ke spesialis.

Pertimbangan pilihan kesehatan masih mengandalkan Puskesmas terdekat dan fasilitas kesehatan gratis serta obat bebas yang dijual di kios-kios terdekat.

Seiring dengan pembukaan kawasan baru akibat adanya penambahan areal kebun sawit jumlah penduduk di sekitar kawasan itupun bertambah, namun kenyataan ini tidak ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai untuk kawasan yang terpencil tersebut. Akibatnya masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan sawit untuk akses pelayanan kesehatan harus menempuh jarak yang cukup jauh yang terletak di pusat Kecamatan seperti di kawasan Suka Mulya yang memerlukan waktu satu jam lebih untuk sampai ke Puskesmas Kecamatan Rantau Panjang.

5.5.2 Dampak Lingkungan

Menurut mayoritas masyarakat penanaman sawit relatif tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti tanah longsor dan banjir serta kekeringan yang biasanya diakibatkan oleh penebangan hutan untuk penanaman sawit. Masyarakat dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tanah longsor akibat dari *deforestation*, dengan menanam tumbuhan lain yang produktif dan memiliki nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sangat sedikit masyarakat yang memahami dan menyadari dampak negatif tanaman sawit terhadap lingkungan, khususnya air. Sebagaimana yang disampaikan oleh informen;

“Saya tahu sawit memang ada dampak kemarau dan banjir, sawit adalah tanaman yang banyak menyerap air. Saat sekarang ada pengurangan debit dan permukaan air tanah. Dulu untuk kebutuhan air bisa dengan menggali sumur, namun sekarang tidak lagi bisa menggali sumur karena airnya sudah sangat dalam. Akan tetapi bagi kami tidak ada pengaruhnya atau tidak ada masalah karena bisa mendapat air dengan membuat sumur bor. Untuk masalah banjir juga sudah semakin sering, akan tetapi sulit untuk menjelaskan apakah banjir tersebut disebabkan oleh sawit, karena sekarang banyak juga faktor lainnya seperti perubahan iklim”.

Namun pada sisi lain, masyarakat menyatakan bahwa pelestarian hutan lebih penting karena untuk menjaga pelestarian lingkungan. Dengan banyaknya hutan iklimnya lebih sejuk. Akan tetapi masyarakat tidak punya kepastian terhadap hasil dari hutan untuk menjadi sumber ekonomi. Usaha sawit lebih pasti hasilnya sehingga kami lebih memilih untuk menanam sawit dan menebang hutan, bahkan kami melakukan *replanting* terhadap tanaman yang saat ini harganya tidak baik, seperti karet.

Menurut ayek, lahan sawit sekarang ini pengalihan fungsi lahan pertanian campuran yang tidak terawat karena ditinggalkan masyarakat semasa konflik. Lahan yang diitumbuhi tanaman liar seperti pete, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tanaman liar tersebut kami potong dan kami ganti dengan tanaman sawit.

Dalam pandangan masyarakat petani sawit sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan sehingga tanaman sawit bukan saja menggantikan tanaman liar yang memiliki nilai pelestarian hutan. Tetapi juga menggantikan tanaman karet yang dinilai oleh masyarakat memiliki nilai ekonomis lebih rendah walaupun memberi dampak terhadap lingkungan yang sejuk. dan susah untuk dikerjakan karena masa kerjanya yang sangat ketat. Harus dikerjakan setiap hari untuk merawat dan untuk memanen. Sementara kalau sawit hanya perlu waktu kerja 15 hari sekali. Sehingga sisa waktu lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan lain.

Lahan sawit yang kami tanam sekarang merupakan bekas *replanting* tanaman karet. Kami tidak lagi menanam karet karena harganya yang tidak stabil dan masa kerjanya yang terlalu terikat. Tanaman sawit disini bukan inisiasi dari pemerintah tetapi kami sendiri yang mengusulkannya untuk menanam sawit (wawancara dengan Suparno, Suka Mulya, 14 Mei 2015) .

Selanjutnya masyarakat menjelaskan bahwa mereka sebagai masyarakat awam lebih penting menyelamatkan manusia dari pada menyelamatkan hutan. Pada hakikatnya yang menyelamatkan hutan dan manusia adalah tuhan. Maka manusia hanya berusaha mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Agar hasilnya memuaskan maka ditanamlah sawit supaya mendapatkan hasil yang

memuaskan bagi manusia. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melarang penebangan hutan untuk menanam sawit.

“Hari ini pemerintah tidak melarang penebangan hutan bahkan memberi bantuan bibit, pembersihan lahan, pupuk dan sebagainya berarti itu boleh dan tidak berdampak, kalau berdampak pasti pemerintah tidak melaksanakan program seperti itu”. (wawancara dengan masyarakat penerima bantuan Abang Ayek, 14 Mei 2015)

5.6 Evaluasi Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejateraan mantan GAM dan masyarakat korban konflik melalui program sawit.

5.6.1 Dasar Kebijakan Program Bantuan Sawit

Pemberian kebun sawit kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik merupakan amanat MoU Helsinki yang tertulis dalam poin 3.2.5 yang berbunyi:

“Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: a). Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; b). Semua tahanan politik yang telah memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja; c). Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja”.

Program pengembangan perkebunan sawit merupakan program pembangunan jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintah Aceh dengan mulai digalakkan kembali tanaman sawit sejak tahun 2008. Menurut pemerintah Aceh pengembangan sektor perkebunan sawit sangat strategis, mengingat kebutuhan akan sawit yang besar di pasaran dunia. Selain itu, masa

panennya akan berlangsung berulang-ulang sehingga diperkirakan mampu melahirkan generasi baru yang lebih sejahtera (Tabloid Tabangun Aceh, 2011).

Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan nilai ekspor paling tinggi di Aceh. Luas areal kebun sawit lebih dari 260,000 hektar dan memberi keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sekitar 200,000 orang. Kelapa Sawit tersebar di sepanjang pesisir Barat dan Tenggara Aceh. Nilai ekspor (FOB) dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diekspor dari Aceh saat ini walaupun sedang mengalami depresi harga global diperkirakan bernilai lebih dari US\$150 juta dollar Amerika. Oleh sebab itu, pengembangan sektor minyak kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama untuk produk- produk makanan dan bahan bakar merupakan salah satu prioritas tertinggi visi Aceh Green (Fricke, 2008)

Kebijakan pengembangan kawasan agribisnis perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Aceh. Kebijakan tersebut telah ada sebelum tsunami, tetapi keberhasilannya terhambat oleh kurangnya sumber daya dan konflik. Membanjirnya sumber daya manusia dan keuangan pasca tsunami dan konflik yang berlimpah, maka kebijakan ini dijalankan kembali secara lebih serius oleh Dinas Perkebunan Aceh, Asian Development Bank (ADB) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Perluasan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi bagian penting dalam perekonomian di Aceh. Pemerintah Aceh juga sangat concern dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mempercepat realisasi program pengembangan perkebunan sawit. Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah aceh juga telah mengeluarkan Qanun Aceh No 06 tahun 2012 tentang Perkebunan. Oleh karena itu program pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh khususnya Aceh Timur adalah dengan memberi bantuan sawit kepada masyarakat melalui kelompok yang mengusulkan bantuan kepada pemerintah.

Program bantuan sawit juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat umumnya sangat setuju terhadap program bantuan dalam bentuk sawit, sawit dapat membantu perekonomian masyarakat karena sawit dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu sawit juga mudah dirawat, tidak menyita waktu sehingga bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Usaha perkebunan sawit juga membantu masyarakat biasa yang tidak menerima bantuan dengan dilibatkan sebagai penjaga, pemanen dan pengangkut buah sawit. Program bantuan Sawit ini merupakan pilihan berdasarkan aspirasi masyarakat dari proposal bantuan yang diajukan oleh masyarakat yang terdiri dari mantan kombatan GAM, Korban konflik dan masyarakat biasa.

5.6.2 Perencanaan Program Bantuan Sawit

Perencanaan merupakan tahap awal dari lahirnya sebuah kebijakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk program bantuan dapat lahir dari inisiatif pemerintah maupun dari inisiatif masyarakat. Program yang lahir dari inisiatif pemerintah merupakan program yang bersifat Top Down. Sedangkan program yang diinisiasi oleh masyarakat merupakan program partisipatif. Kedua jenis perencanaan tersebut tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Program bantuan sawit untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik direncanakan oleh pemerintah Aceh berdasarkan pada kebijakan pemerintah dan amanat MoU Helsinki. Setelah kebijakan ini disusun, pemerintah Aceh kemudian menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemberdayaan melalui program bantuan sawit. Rencana ini kemudian direspon oleh masyarakat melalui pengiriman proposal kepada pemerintah Aceh.

Dalam perencanaan program bantuan sawit, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam menyusun program bantuan dari tahap awal perencanaan. Program sawit ini sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat hanya tahu ada program bantuan sawit sehingga mereka membuat proposal untuk meminta bantuan tersebut. Setelah itu masyarakat tidak tahu bagaimana proses pada tingkat pemerintah secara mendetil.

Menurut pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini Dinas Kehutan dan Perkebunan, bantuan yang kami berikan bersifat aspiratif, kerana masyarakat sendiri yang mengusulkan proposal untuk diberikan bantuan sawit. Pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan yang disampaikan oleh masyarakat yang menerima bantuan.

“Tidak semua masyarakat tahu jika ada program pemberdayaan yang direncanakan oleh pihak pemerintah daerah karena selama ini hanya orang-orang tertentu saja yang memperoleh informasi jika ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan informasi itu tidak disampaikan kepada masyarakat umum di Desa, bahkan kepada anggota kelompok sekalipun sebahagian tidak mengetahui bantuannya sudah diberikan atau belum” (FGD dengan masyarakat Seuneubok Buya Idi Tunong, 17 Mei 2015).

5.6.3 Pelaksanaan Program Bantuan Sawit

Pemberian bantuan sawit kepada mantan kombatan GAM dan Korban Konflik di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan proposal dan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Penerima atau anggota kelompok serta kriterianya ditentukan oleh kelompok itu sendiri, pemerintah tidak lagi mengeceknya. Petugas pemerintahan menganggap hal itu sudah selesai, kerana kepala desa, camat dan panglima sagoe sudah melakukan hal tersebut. Semua proposal yang dikirimkan ke dinas terlebih dahulu diketahui dan ditandangi oleh tiga lembaga tersebut. Jika pun terdapat orang kaya di dalamnya kami tidak berhak mencoret nama mereka, hal itu menjadi tanggung jawab kelompok.

Tugas pemerintah daerah kabupaten (Dinas kehutanan dan perkebunan) memverifikasi terhadap Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) apakah sesuai dengan usulan proposal. Petugas Dinas juga hanya memverifikasi apakah calon penerima memiliki lahan yang akan digunakan untuk penanaman sawit yang akan diterima.

Para penerima program bantuan sawit bervariasi yaitu mantan Kombatan GAM, korban konflik dan juga masyarakat biasa. Syarat penerima bantuan adalah kepemilikan lahan untuk penanaman bibit sawit. Dalam penentuan CPCL

melibatkan masyarakat langsung, dinas hanya memfasilitasi dalam hal persediaan jumlah bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan penunjang seperti alat dodot dan Grek (alat angkut tandan sawit). Namun dari hasil verifikasi dengan petugas lapangan, dalam hal penentuan proposal mana yang akan diprioritaskan sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan kekerabatan kelompok yang mengajukan proposal dalam mencari informasi dan memfollow up pengajuan proposal mereka.

Ada beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan sawit ini. Kekurangan pelaksanaan tersebut antara lain pihak dinas tidak melakukan survey awal secara khusus terkait dengan kesesuaian lahan dengan program bantuan yang diberikan. Pihak pemerintah juga tidak melakukan studi analisis terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penanaman sawit yang akan dilakukan seperti kajian AMDAL dan analisis lainnya yang terkait dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, dinas hanya bergantung kepada proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat. Begitu juga dengan analisis atau evaluasi dampak terhadap lingkungan dari penanaman sawit bantuan tersebut. Jadi dikarenakan tidak pernah ada analisis khusus, maka pihak dinas tidak mampu menjelaskan dampak lingkungan dari penanaman sawit tersebut.

5.6.4 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sawit

Dalam proses penyaluran bantuan, berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala. Akibatnya penyaluran bantuan bibit sawit oleh dinas ada yang belum ditanam sampai saat ini, dan ada masyarakat menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Selain itu, sebahagian masyarakat penerima mesti mengeluarkan uang ongkos antar Rp 1000 per batang bibit sawit, sehingga masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan uang tersebut bantuanpun tidak dapat memperolehnya.

Untuk itu, monitoring perlu dilakukan terutama dalam memastikan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan prinsip keadilan yaitu memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh

masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

5.7 Analisis Model Pengentasan Kemiskinan

Pembukaan areal sawit bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM di kabupaten Aceh Timur telah dilakukan sejak tahun 2009. Penanaman sawit sebagian dilakukan pada lahan baru tetapi ada juga yang digunakan pada lahan yang ditinggalkan ketika konflik yang sebelumnya difungsikan untuk tanaman *polikultur*. Namun semua lahan ini baik lama maupun baru adalah merupakan lahan milik pribadi masyarakat, pemerintah hanya memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat. Bantuan tersebut diusulkan oleh masyarakat melalui kelompok masing-masing kepada pemerintah Aceh berdasarkan informasi yang didengar dari pegawai pemerintah. Kemudian pemerintah Provinsi mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten (melalui dinas kehutanan dan perkebunan) untuk melakukan verifikasi ke lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut memiliki lahan. Dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten menunjuk seorang pengawas lapangan untuk berkoordinasi dengan ketua kelompok dalam usaha memastikan semua bantuan dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan.

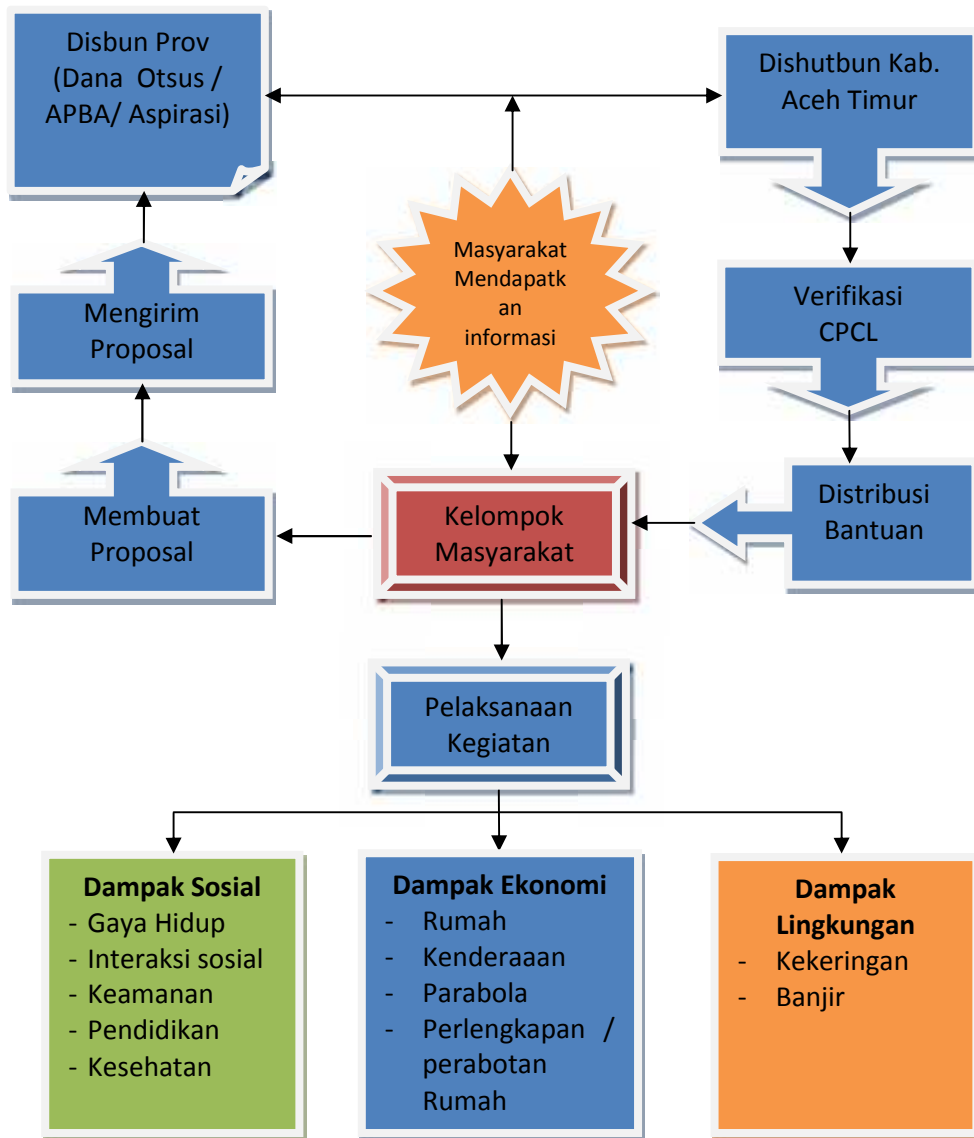
Berdasarkan kenyataan ini dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui komoditi sawit yang terjadi di kabupaten Aceh Timur adalah berbasis *top down dan bottom up*, di mana program penanaman sawit sebagai program pengentasan kemiskinan telah ditentukan oleh pemerintah, tetapi untuk mendapatkan bantuan sawit masyarakat harus proaktif mengajukan bantuan kepada pemerintah. Kenyataan ini tidak memenuhi standard pemberdayaan yang ideal, karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan menerapkan sistem kompetisi dikalangan masyarakat untuk memperoleh bantuan. sehingga masyarakat yang

lemah pendidikan dan jaringan informasi tetap tersisihkan dari program pemberdayaan. Apalagi kriterianya tidak memprioritaskan masyarakat miskin.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, Pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

Berdasarkan gambaran pemberdayaan yang dilakukan melalui komoditi sawit, secara skematis model kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Aceh melalui pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana berikut:

5.5: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit di Kabupaten Aceh Timur



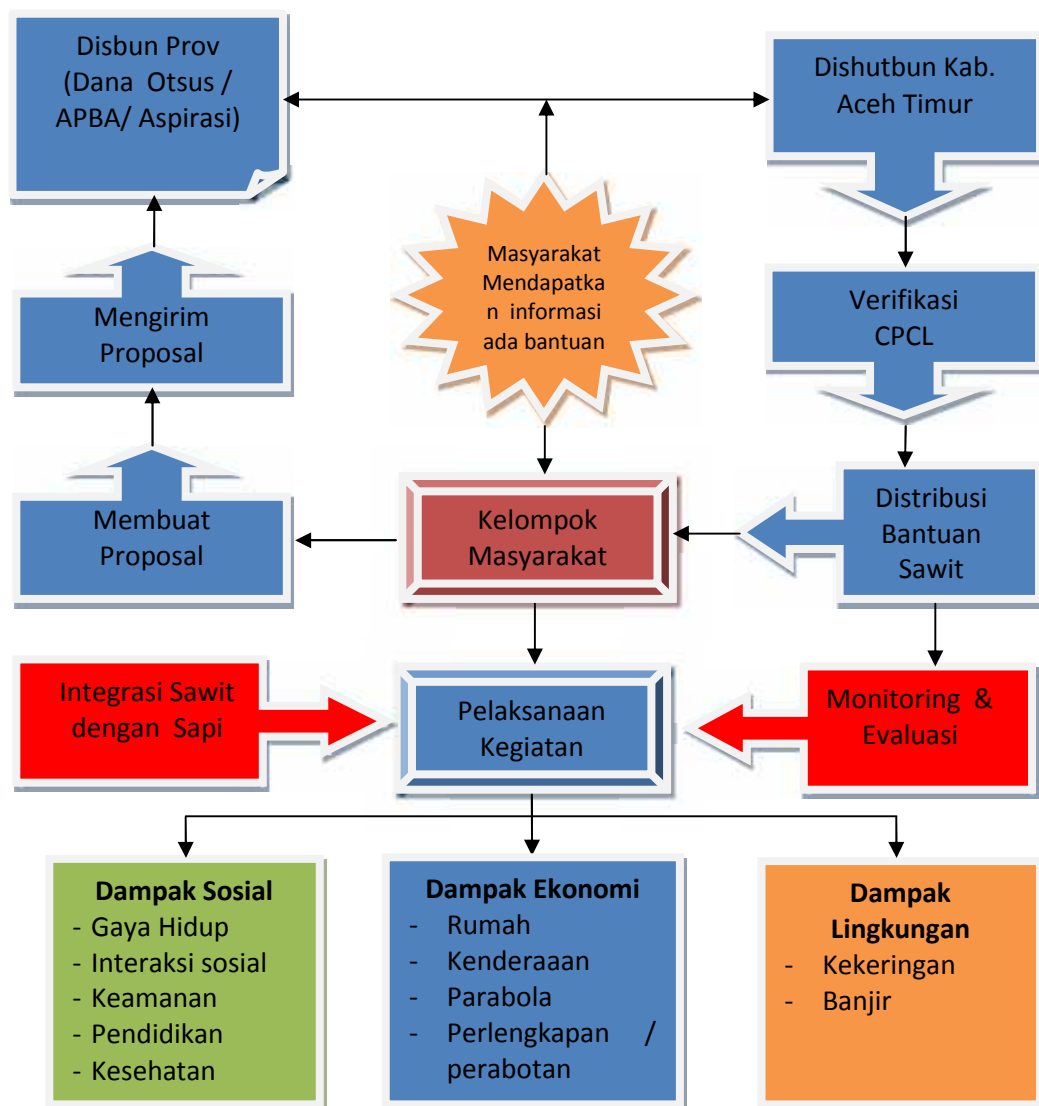
Gambar di atas menjelaskan bahwa:

1. Masyarakat mendapat informasi adanya bantuan pertanian dari Pemerintah Aceh, kemudian mencari kebenaran dan kepastian tersedianya bantuan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten.
2. Masyarakat membentuk kelompok petani secara bersama.

3. Kelompok petani menyiapkan proposal bantuan pertanian.
4. Mengirimkan proposal bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh setelah mendapat rekomendasi dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur untuk pelaksanaan program.
6. Dinas Kabupaten melakukan verifikasi dan seleksi kelompok dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
7. Dinas Provinsi menyalurkan bantuan kepada kelompok tani yang disetujui dan bantuan tersebut didampingi oleh petugas dari dinas kabupaten untuk memastikan bantuan telah diterima oleh ketua kelompok.
8. Pelaksanaan program yaitu bantuan sawit diterima oleh kelompok tani ditanam, dirawat, hingga memetik hasil panen.

Model pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas akan lebih maksimal pelaksanaannya jika pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan tersebut. Hal ini penting dilaksanakan sebab dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ada bibit sawit bantuan pemerintah yang sampai hari ini belum ditanam oleh masyarakat dengan berbagai alasan, seperti lahan belum siap, bibit yang dikasih terlalu kecil sehingga tidak ditanam dulu takut dimakan hama. Seperti yang terjadi di kawasan Ranto Panjang dan Idi Tunong.

Oleh karena itu model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan baik oleh dinas ataupun melibatkan mitra lainnya. Maka penyempurnaan model yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:



Jika monitoring terus dilakukan oleh pemerintah sampai masa panen maka permainan harga oleh pihak swasta dapat ditekan oleh pemerintah. Jika permainan harga dipantau oleh pemerintah maka yang untung adalah petani sawit, kalau tidak maka akan terjadi sebaliknya. Petani yang berdaya sesuai dengan harapan pemerintah menjadi utopia belaka.

Selain itu monitoring juga diperlukan dalam program bantuan sawit ini supaya tidak terjadi pergantian anggota kelompok penerima secara sepihak oleh ketua kelompok tanpa memberi tahu anggota sebelumnya yang telah mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat

pembentukan kelompok. Jika hal ini terjadi maka dikhawatirkan akan muncul konflik sosial di dalam masyarakat. Apabila konflik sosial muncul kestabilan sosial dalam masyarakat terganggu.

Jika integrasi sawit dengan sapi dapat dilaksanakan maka manfaat yang akan diperoleh antara lain; (a) rumput dalam kebun sawit dapat dimakan langsung oleh sapi tanpa harus dipotong oleh petani sehingga hemat waktu dan tenaga serta areal kebun sawit menjadi bersih, (b) Kotoran sapi dalam jumlah banyak bisa dijadikan biogas. (c) Sambil menjaga sapi bisa mengurus kebun sawit. Jadi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang kami dimasukkan dalam penyempurnaan model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang; pertama unsur monitoring dan kedua integrasi program. Dalam pelaksanaan program integrasi sawit dan sapi ini juga kami berharap akan terjadi integrasi program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada saat musrenbang sehingga program ini akan lebih cepat terlaksana.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui komoditi sawit di Kabupaten Aceh Timur yang difokuskan kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dalam menentukan lokasi dan penerima manfaat. Pelibatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur hanya bersifat formalitas saja, karena masyarakat melalui kelompok dapat mengusulkan langsung bantuannya kepada Pemerintah Aceh tanpa melalui Pemerintah Aceh Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur fungsinya hanya sebagai pendistribusi dan pengawas program bantuan dari Pemerintah Aceh.

Hasil pemetaan, areal sawit bantuan di Aceh Timur melingkupi 23 kecamatan. Areal Perkebunan Sawit di Aceh Timur dapat dibagikan dalam dua kategori berdasarkan penggunaan lahan, yaitu: (1) areal perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan dan; (2) perkebunan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Bantuan yang diberikan untuk mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik lokasi arealnya tidak dipisahkan karena lahannya adalah milik masyarakat sendiri. Pemerintah tidak menyediakan lahan sawit, kecuali lahan bagi kombatan di Pantee Bidari. Selain itu, bantuan yang diusulkan melalui kelompok, anggotanya terdiri dari tiga komponen masyarakat, yaitu masyarakat biasa, mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik. Ini karena dalam terminologi masyarakat Aceh semua masyarakat menganggap dirinya sebagai korban konflik.

Program bantuan sawit yang dijalankan di Aceh Timur telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya peningkatan

pendapatan petani penerima bantuan maupun masyarakat sekitarnya. Penanaman sawit juga telah membuka lapangan kerja kepada masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan juga berdampak terhadap peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan menurun. Pada akhirnya pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit dapat menghilangkan sikap separatisme di masyarakat Aceh. Namun telah muncul sikap antagonism dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat yang tidak menerima bantuan, melihat pemberian bantuan tersebut tidak adil. Masih banyak masyarakat yang lebih pantas menerima bantuan, tetapi tidak menerimanya walaupun awalnya telah diminta fotokopi kartu identitas untuk dapat dimasukkan dalam anggota kelompok.

Selain itu, bantuan sawit tidak banyak memberi dampak positif terhadap partisipasi pendidikan anak ke jenjang pendidikan menengah. Terutama sekali pendidikan menengah atas, karena pendidikan tersebut masih dihalangi oleh jarak tempuh menuju sekolah yang jauh, yang tersebar di pusat kota kecamatan. Begitu juga dengan akses kesehatan, masyarakat masih mengandalkan Puskesmas terdekat walaupun pelayanan kurang memuaskan. Ini karena fasilitas jalan yang belum diaspal.

Walaupun bantuan sawit telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat MoU Helsinki sebagai pondasi pembangunan perdamaian. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan menyediakan lahan pertanian bagi mantan GAM dan masyarakat korban konflik, namun pada kenyataannya mereka harus memiliki lahan sendiri sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sawit. Selanjutnya proses pemberian bantuan tersebut sebagai strategi pemberdayaan masyarakat belum dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan partisipatif, demokrasi dan adil. Hal ini karena tidak semua masyarakat memperoleh informasi tentang adanya bantuan, sehingga masih banyak korban konflik yang layak menerima bantuan tidak terlibat dalam bantuan tersebut. Disamping itu, pemerintah sudah merencanakan program tersebut terlebih dahulu melalui dinas terkait, sehingga masyarakat dalam mengusulkan bantuan harus mampu

menyesuaikannya dengan program bantuan pemerintah yang sudah ditetapkan. Hal ini sekaligus membuka peluang kepada mereka yang punya akses informasi tentang bantuan, dan menutup peluang bantuan bagi masyarakat yang tidak mengetahui program bantuan yang dicadangkan oleh pemerintah.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran penting yang diajukan: pertama program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan, dari pembukaan lahan hingga panen. Kedua, Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pihak swasta khususnya para pembeli hasil panen sawit untuk menghindari permainan harga yang merugikan petani. Ketiga, pemerintah perlu membentuk koperasi untuk membeli sawit agar mengimbangi harga sawit yang sering dipermainkan oleh pedagang di pasar. Keempat pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendirikan industri pengolahan minyak kelapa sawit menjadi produk yang siap untuk digunakan oleh masyarakat. Kelima, pemerintah dalam memberikan bantuan perlu melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya petani dan sosial agar rasa tanggung jawab masyarakat terhadap bantuan yang diterima lebih besar. Keenam, perlu model pemberdayaan yang partisipatif, komprehensif dan integratif agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Friedel Hutz, 2011, Minyak Kelapa Sawit, Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak kelapa sawit, <http://www.brot-fuer-die-welt.de/> Akses 23 Oktober 2014.
- Almasdi Syahza, 2005, Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi PeDesaan Di Daerah Riau, *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Antjok, Jamaluddin, 1995, Pemanfaatan organisasi lokal untuk mengentaskan kemiskinan – dalam kemiskinan dan Kasusenjangan di Indonesia, Adytia Media, Yogyakarta.
- Basyid, Abdul. tt. *Pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok petani*.[http://www. Balitnak.litbang.pertanian.go.id](http://www.Balitnak.litbang.pertanian.go.id)
- Burhan. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat di PeDesaan*. Departemen Agribisnis FEM IPB.
- BPS Aceh Timur, 2010. Aceh Timur dalam Angka, <http://acehtimurkab.bps.go.id>.
- BPS Aceh Timur, 2014. *Aceh Timur Dalam Angka 2014*. Aceh Timur: Badan Pusat Statistik
- Dalle Daniel Sulekale, 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>
- Dillon, Hs, 1993, Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global, Prisma No. 3-LP3ES Jakarta.
- Erwin, dkk (2009) *Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bkar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim*. Semiloka.
- Effendi, Machroes, 1996, Dampak Sosial ekonomi dan Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara KIII di Kalimantan Barat. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Fricke, B. Thomas, 2008. *Prarencana laporan dan rekomendasi strategi pembangunan minyak kelapa sawit berkelanjutan untuk Aceh Green*. http://www.stcresources.com/wp-content/uploads/2010/11/Rekomendasi-Minyak-Kelapa-Sawit-Aceh-Green_FINAL.pdf.

- Green Peace, 2010, *Teratngkap Basah, Bagaimana eksploitasi minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis Iklim dan Orang Hutan*. www.greenpeace.org.
- Indiahono, Dwianto. 2009. *Kebijakn Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Mawardati, 2010, *Penggunaan Faktor Produksi Dan Penerapan Teknologi Serta Kaitannya Dengan Pemilihan Saluran Pemasaran (Suatu Kasus Pada Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Univesitas Padjadjaran, Bandung.
- Neuman, L.W. 1997. *Social Reseach Methodes: Qualitative & Quantitative Approach*. Boston: Allyn Bacon.
- Nugroho, Heru. 2001. *Menemukan Ide-Ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soeharto, E. 2008. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*. <http://www.policy.hu./soeharto/modul>.
- Suharto, E. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Starhm, Rudolf H, 1995. *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah kegagalan Pembangunan di Negara berkembang*, CIDES, Jakarta.
- Selo Sumarjan, 1977. *Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi*, Jurnal Sosiologi Indonesia No. 2-1977, Ikatan sosiologi Indonesia.
- Winarno. 2007. *Teori dan Proses Kebijakn Publik*. Jogjakarta: Media Presindo.